

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah termanifestasikan sebagai produk hukum di berbagai negara di dunia salahsatunya adalah di Indonesia. Atho' Mudzar mengatakan terdapat empat macam produk hukum Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu : kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim.¹

Beberapa negara yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum yang berlaku, terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang diterapkan. Yaitu negara yang menerapkan hukum keluarga secara tradisional², yang menerapkan hukum keluarga secara sekuler, dan negara yang menerapkan hukum keluarga yang direformasi³.

Negara yang termasuk menerapkan hukum keluarga secara tradisional adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigera, Sinegal, dan Somalia. Negara yang termasuk menerapkan hukum keluarga secara sekuler adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas penduduk muslim Philipina. Sedangkan negara yang menerapkan hukum keluarga yang

¹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilah Press, 1998) h. 91

² Minhajuddin mengatakan secara tradisional maksudnya ialah sikap yang sangat resisten terhadap perubahan, contohnya dalam hal poligami, menurut mufti Arab saudi yaitu Ibnu Baz asas perkawinan dalam Islam adalah poligami. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami merupakan sunnah nabi yang dianjurkan. Lihat : Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015), h. viii

³ Reformasi atau pembaruan hukum keluarga di dunia muslim bukan hanya ditandai dengan digantinya fikih keluarga dengan hukum-hukum barat, akan tetapi termasuk reformasi juga dengan melakukan reinterpretasi atau penafsiran kembali terhadap fikih keluarga sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), h. 17 . Lihat juga : Jhon J. Donohue dan Jhon L. Elposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Pererjemah Machnun Husein, (Jakarta : Rajawali Press, 1995) h. 365-366

direformasi adalah diterapkan pertama kali oleh Turki, Libanon, Tunisia, Mesir, Indonesia, Malaysia, Brunei⁴.

Termasuk hal yang menjadi persoalan⁵ di dunia muslim mulai dari periode klasik hingga kontemporer saat ini, salah yaitu tentang bagaimana Islam sebagai agama yang bersifat universal dapat merespon berbagai macam persoalan yang menyangkut hukum keluarga (*al-Ahwal al-Shakhsiyah*) yang terdapat di banyak komunitas muslim yang tersebar di dunia.⁶

Salah satu dari sekian banyak permasalahan tersebut yaitu mengenai batas minimal usia menikah yang diberlakukan di tiap negara yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya asas yang diterapkan dalam undang-undang perkawinan adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai, tetap saja undang-undang perkawinan di dunia Islam berbeda dalam menentukan ambang batas usia perkawinan.⁷ Di tujuh belas negara undang-undang perkawinan memiliki batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan sebagai berikut.

Algeria 21 dan 18 tahun, Bangladesh 21 dan 18 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun Libann 18 dan 17 tahun, Libya 18 dan 16 tahun Malaysia 18 dan 16 tahu, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Somalia 18 dan 18 tahun, Yaman Selatan 18 dan 16 tahun, Syiria 18 dan 17 tahun, Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.⁸

Jika melihat data di atas, sebenarnya batasan minimal usia perkawinan di Indonesia yang termaktub pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h.3

⁵ Dapat kita cermati bahawa yang menjadi pokok-pokok permasalahan pada undang-undang hukum keluarga Islam pada abad ke-20 antara lain, batasan umur menikah, wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, mahar dan biaya perkawinan, poligami dan hak istri, masalah talak di pengadilan, hak istri yang dicerai, pemeliharaan anak pasca perceraian wasiat, hingga wakaf keluarga.

⁶ YUSDANI, *Op.cit.*, h. iii

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.27

⁸ YUSDANI, *Op.cit.*, h. 46 lihat juga : Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi : Academy of Law and Religion 1987), h. 1-

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁹ yang menyatakan perkawinan dapat dilakukan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun tidak terlalu tinggi sebagaimana yang berlaku di Algeria atau terlalu rendah seperti yang diberlakukan di Yaman Utara.

Sedangkan di Malaysia yang merupakan negara federal sampai sekarang belum mempunyai undang-undang hukum keluarga yang berlaku secara nasional.¹⁰ Akan tetapi dalam undang-undang negara bagian Malaysia secara keseluruhan menyebutkan bahwa batasan minimal usia perkawinan laki-laki adalah 18 tahun dan batasan minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun. Salah satunya yang tertuang pada Enakmen Negeri Sabah pada bagian II seksyen 8. Seksyen 8 menyatakan:

“Tiada suatu perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”¹¹

Berbeda lagi yang di berlakukan di Negara Brunei Darussalam, jika di Malaysia tiap negara bagian memiliki Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berbeda-beda sesuai negara bagian, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam berbeda berdasarkan etnis dan agama. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*) tertuang pada *Laws of Brunei* Bab 217 tidak secara jelas memuat tentang batas minimal usia nikah, akan tetapi terdapat di beberapa Pasal yang mengatakan bahwa menghalang perkawinan laki-laki yang telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan yang telah mencapai 16 tahun merupakan suatu pelanggaran

⁹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 khususnya tentang batasan minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 untuk segera dirubah oleh pembentuk undang-undang dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2011), h. 59

¹¹ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Sabah, 2004

terhadap undang-undang dengan ancaman denda maksimal dua ribu dolar, penjara maksimal enam bulan atau keduanya.¹²

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam banyak memiliki kesamaan, ketiga negara tersebut juga dapat dikatakan berada dalam satu lingkup teritori. Kesamaan ketiga negara tersebut ialah sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dengan mayoritas paham agama yang sama pula yaitu mazhab Syafi'i, dengan bahasa pemersatu yaitu Bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*) di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Berdasarkan data diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga Negara di atas yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, adalah negara yang dalam penerapan hukum keluarganya berbentuk hukum keluarga yang direformasi. Ketiga Negara tersebut memiliki kesamaan mengenai batas minimal usia menikah. Negara tersebut juga negara Islam walaupun Indonesia tidak mengakui sebagai negara muslim pada kenyataannya Indonesia merupakan negara yang berkependudukan muslim terbesar di dunia. Yang menjadi persoalan adalah mengapa ketiga negara tersebut menetapkan batas minimal usia menikah yang berbeda, padahal banyak kesamaan antara ketiga negara tersebut.

Oleh sebab itu hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang menganut penerapan berupa reformasi hukum Islam hendaknya dilaksanakan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, dan hendaknya didasarkan kepada *maslahah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqoshid al-shari'ah* dan sesuai dengan tujuan-tujuan hukum dalam sistem hukum. Dengan harapan reformasi hukum keluarga Islam yang mendapat legislasi dari pihak yang berwenang ini dapat menciptakan ketentraman, kedamaian dalam

¹² *Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law*. Bagian IV No.35 (b)

kehidupan masyarakat Islam dan masyarakat luas pada umumnya.¹³ Berdasarkan problem akademik yang penulis sampaikan di atas, maka penulis menilai penting untuk meneliti peraturan batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam prespektif *masalah mursalah* dan politik hukumnya.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengidentifikasi berberapa masalah, yaitu:

- a. Terdapat penerapan hukum keluarga yang berbeda di berbagai negara, yaitu secara tradisonal, sekuler, dan hukum keluarga yang direformasi.
- b. Batas usia minimal menikah yang berbeda di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam padahal ketiga negara tersebut memiliki banyak kesamaan yaitu berada dalam satu rumpun, dan dari sisi paham keagamaan sama-sama bermazhab Syafi'i.
- c. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang menginstruksikan perubahan batas minimal usia menikah bagi perempuan.
- d. Adanya persamaan dan perbedaan batas minimal usia nikah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
- e. Eksistensi teori *masalah* dan politik hukum dalam peraturan mengenai batas minimal usia menikah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

2. Batasan Masalah

Setelah melihat adanya berbagai identifikasi permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti membataskan masalah pada penelitian ini pada

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Pedrdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) h.2

tinjauan politik hukum dan penggalan nilai *masalah* dalam peraturan batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam agar peneitian ini tetap fokus dan terarah kepada permasalahan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap perbandingan batas minimal usia menikah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yaitu:

1. Bagaimana politik hukum dalam penetapan batas minimal usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap batas minimal usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui politik hukum dalam penetapan batas minimal usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap batas minimal usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan berbagai manfaat bagi pembacanya. Peneliti membagi manfaat penelitian menjadi tiga manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi akademisi dan peneliti lainnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah dan kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai batasan usia minimal menikah di berbagai negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang batas minimal usia menikah di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap pembentukan undang-undang dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan.

3. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait batas minimal usia perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan batas minimal usia menikah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai batas minimal usia perkawinan terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batas minimal usia menikah, antara lain :

1. Khoiruddin Nasution, buku dengan judul “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia: Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*”. Buku tersebut membahas tiga topik utama yaitu: *Pertama*, kajian histori pembentukan dan pembaruan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. *Kedua*, berbagai metode pembaruan hukum keluarga yang ada di berbagai negara. *Ketiga*, pembahasan tematik tentang hukum perkawinan Islam, poligami, pencatatan perkawinan dan umur perkawinan. Pembahasannya menggunakan kombinasi antara metode tematik dan metode holistik (tematik-holistik) dengan menggunakan pendekatan integratif interkonektif.¹⁴
2. A. Kumedi Ja’far, Penelitian disertasi pada tahun 2018 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Batas Usia Perkawinan)*”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah; secara historis lahirnya ketentuan usia perkawinan di dalam UU Perkawinan terinspirasi dari gugatan para wanita yang menginginkan pentingnya pendidikan bagi mereka; korelasi UU Perkawinan dengan aturan hukum lainnya adalah pada sisi pemenuhan kesejahteraan keluarga, sehingganya jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia: Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas; Konstruksi pembaruan hukum keluarga dalam konteks usia perkawinan diawali melalui *re-research* terhadap hadis yang menjelaskan pernikahan Nabi Muhammad saw dengan putri Abu Bakar as-Ashiddiq ('Aisyah ra), di mana dalil tersebut masih bersifat problematik, sehinganya jika ditarik melalui pendekatan QS. ar-Rum ayat 21, maka konsep Qur'ani yang ditarik ke kontak budaya bangsa Indonesia adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA.¹⁵

3. Iwan Romadhan Sitorus, penelitian disertasi pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *"Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner"* Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Ketentuan usia minimal 21 tahun bagi pihak laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan usia 21 tahun tersebut, laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini maka peneliti menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan

¹⁵ A. Kumedi Ja'far, "Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Batas Usia Perkawinan)". (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

pertimbangan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*rasyd*) menjadi pemimpin keluarga.¹⁶

4. Achmad Asrori, dalam Jurnal *Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015 dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*”, Artikel ini mengulas pendapat para ulama mazhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi’i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.¹⁷
5. Achmad Rif’an, Penelitian tesis pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*”. Penelitian ini berupa penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Hasil dari penelitian ini : Terdapat pro dan kontra mengenai penetapan batasan usia menikah. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman kepada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan sedangkan yang pro didasari oleh sebuah

¹⁶ Iwan Romadhan Sitorus, “*Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner*”. (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam “ dalam *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

perubahan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Juga faktor kesamaan hak laki-laki dan perempuan, dan perlindungan terhadap anak.¹⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahwa peneliti akan menitikberatkan fokus penelitian pada politik hukum dan konsep *maslahat* dalam pembentukan serta penerapan hukum batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.¹⁹ Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali²⁰ mengartikan *maslahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *maslahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan

¹⁸ Achmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹⁹ Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h.383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), h.303

²⁰ Al Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 hijriyah, tepatnya pada tahun 450 H/1058 M didesa Thus, Khurasan, Iran.

sebagai *mafsadah*. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah masalah.²¹

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *masalah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalah mu'tabar*, yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.²² Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.²³

Berdasarkan kekuatan *masalah* al-Gazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.²⁴

²¹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz ke-1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h.416-417.

²² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op.Cit.*, h.414.

²³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

²⁴ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam²⁵ mengatakan bahwa *masalahah* itu identik dengan sebuah *al-naf’* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-husn* (kebaikan).²⁶ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *masalahah* dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar’i*. Al-Tufi²⁷ menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *masalahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar’i*, *masalahah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-Syari’*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.²⁸ Ia menegaskan bahwa *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari’ah*.²⁹

Sedangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam mengkategorikan *masalahah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.³⁰ Selain itu, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam juga mengkategorikan *masalahah* menjadi dua macam, yaitu (1) *masalahah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masalahah majaziy*

²⁵ Nama lengkap Syaikh Izzuddin adalah Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Humman al-Salami al-Dimasyqi al-Syafi’i. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 578 H.

²⁶ *Ibid.*, h.416-417

²⁷ Najmuddin al-Thufi seorang ulama asal Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad di mana ia dilahirkan. Nama aslinya adalah Sulayman Ibn ‘Abd al-Qawi Ibn ‘Abd al-Karim Ibn Sa’d. Beliau hidup sekitar tahun 680 H/1259 M hingga 739 H/1318 M, pada masa hancurnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan.

²⁸ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

²⁹ Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

³⁰ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *masalahah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *masalahah*.³¹

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*masalahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.³² Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *masalahah*. Keberadaan *masalahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *masalahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *masalahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan *‘illah* yang menghantarkan kepada sebuah *masalahah*.³³ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *masalahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa‘id al-syar‘iyyah* yang bertumpu pada penggalan hikmah dan *‘illah* yang merupakan inti dari sebuah *masalahah*

³¹ *Ibid.*, h.14.

³² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

³³ Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar'iyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyah*.³⁴

Perwujudan sebuah *masalah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *masalah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.³⁵ Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *masalah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.³⁶ Karena pada hakikatnya *masalah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.³⁷

Sedangkan upaya mengidentifikasi sebuah *masalah* melalui jalan *istiqra'* adalah tawaran dari al-Syatibi³⁸, walaupun dalam pernyataannya sendiri al-Syatibi mengatakan bahwa ia tidak menafikan dua metode lainnya

³⁴ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

³⁵ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makaanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

³⁶ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

³⁷ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

³⁸ Abu Ishaq asy-Syathibi (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

dalam upaya mengidentifikasi sebuah *masalah*.³⁹ Untuk mengetahui *al-maqasid al-syar'iyah* al-Syatibi menggagas pemikiran dengan cara berikut. *Pertama*, dengan menggunakan logika kebahasaan Arab guna memahami tujuan legislasi suatu hukum. *Kedua*, menganalisis secara tekstual dan kontekstual, hal yang berkaitan *al-amr* dan *al-nahy* yang terdapat dalam nas. *Ketiga*, mengetahui dan memahami tujuan-tujuan pokok (*almaqasid al-asliyyah*) dan sekunder (*al-maqasid al-taba'iyah*). *Kelima*, dengan menerapkan metode *al-istiqra'*.⁴⁰

Dalam ilmu *ushul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *masalah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.⁴¹ Bahkan metode *masalah* ini menurut Ahmad Fathi Bahnasi telah dipraktikkan lebih dulu oleh para *tabi'in* dengan keluar dari kungkungan tekstual nas yang bersifat umum menuju pencapaian sebuah *masalah*. Dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah nas dalam prespektif *masalah* walaupun pada pencapaiannya rekesan bahwa itu sebuah *taqyid* atau *takhsis* atau *ihmal* terhadap teks sebuah nas.⁴²

Dalam pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

⁴⁰ Ahmad al- Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy), h.295-314.

⁴¹ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

⁴² Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyyin*, (t.tp.: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M)

langsung⁴³. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *maslahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *maslahah*; dan sifat dari *maslahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *maslahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.⁴⁴

Dalam proses legislasi al-Qur'an Ahmad Hassan mengatakan hendaknya tetap mempertimbangkan kemampuan manusia dan kondisi sosial. Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan guna membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih didasarkan pada moralitas ketimbang hukum. Oleh karena itu dalam menjelaskann perintah-perintahnya al-Qur'an menggunakan bahasa nalar dan tujuan, walalupun sejatinya tidak peru demikian dalam penyampaian suatu otoritas yang sifatnya absolut. Hal inilah yang melatarbelakangi teks al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga dapat beradaptasi terhadap realita kehidupan yang terus berkembang.⁴⁵

Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa *maslahah* tidak terikat dengan batasan-batasan seperti yang berlakukan terhadap metode *qiyas* dan *istihsan*. Hashim menerangkan dalam menggali sebuah *maslahah* mujtahid dituntut untuk berinisiatif menentukan besar kecilnya *maslahah* yang diperlukan dalam suatu kasus yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat

⁴³ Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

⁴⁴ Bustami Muhammad Sa'id, *Maqhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

⁴⁵ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

banyak. Selebihnya *masalah* bersifat umum dan mendukung terwujudnya nilai pokok dari syariat Islam, dan tidak bersebrangan dengan nas yang ada.⁴⁶

Yusuf al-Qaradawi⁴⁷ berpendapat bahwa substansi *masalah* yang diinginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan *masalah* yang sifatnya holistik yang mencakup perpaduan antara *masalah duniawiyyah* dan *masalah ukhrawiyyah*, *masalah maddiyyah* dan *masalah ruhiyyah*, *masalah fardiyyah* dan *masalah mujtama'iyah*, *masalah qaumiyyah khassah* dan *masalah insaniyyah 'ammah*, *masalah hadirah* dan *masalah mustaqbalah*. Yusuf al-Qaradawi melalui pendapatnya ini menekankan bahwa konsep *masalah* yang ada dalam syariat Islam, tidak dapat diidentikkan dengan paham utilitarianisme dan pragmatisme, yang menginduk pada paham materialisme.⁴⁸

Yusuf al-Qaradawi memiliki cara yang berbeda dalam mengidentifikasi *al-maqasid al-syar'iyyah* tersebut. *Pertama*, meneliti setiap *'illah* yang tersurat maupun tersirat pada teks al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, mengetahui dan memahami hukum-hukum partikular, yang kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁴⁹

Imran Ahsan Khan Nyazee⁵⁰ mengatakan kehujjahan teori maslahat diakui secara menyeluruh oleh ulama sebagai dasar suatu ketetapan hukum. Perlu diketahui bahwa konsep *masalah* merupakan alternatif terbaik dalam

⁴⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

⁴⁷ Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), h.62.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.23-25.

⁵⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee (عمران احسن خان نیازی; lahir 25 Oktober 1945, Pakistan) adalah seorang sarjana hukum Pakistan. Dia telah mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad (IIUI) selama lebih dari 20 tahun.

mengembangkan metode-metode ijtihad, dengan cara memahami al-Qur'an dan Hadis melalui berbagai metode ijtihad dengan bertitik tumpu pada *masalah*.⁵¹ Konsep *masalah* merupakan aplikasi perubahan hukum. Dengan menggunakan konsep ini para mujtahid memiliki kerangka kerja yang ideal dalam menjawab masalah hukum, dengan tetap bersandar kepada nas al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi materiil hukum. Dengan konsep *masalah* para mujtahid dapat memberi legitimasi pada aturan hukum baru. Akan tetapi nilai *masalah* yang diterapkan bergantung kepada pola penalaran hukum yang diterapkan para mujtahid.⁵²

Mohammad Hashim Kamali⁵³ berpendapat bahwa dalam *masalah* yang merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah* dapat diidentifikasi dengan: (1) nas syariat terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy*, (2) '*illah* dan *hikmah* yang terkandung dalam nas syariat dan (3) *istiqra'*. Identifikasi *masalah* dengan cara mengkaji nas syariat, terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy* dilakukan oleh ulama Mazhab Zahiri sebagai kelompok yang terkenal tekstualis dalam pemikiran hukum Islam. Sementara identifikasi *masalah* dengan melalui penggalian '*illah* dan *hikmah* yang terkandung dalam nas syariat dilakukan oleh mayoritas ulama teoritis hukum Islam.

Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa mengaktegorikan *masalah* berdasarkan batasannya. Pertama, *masalah 'ammah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan umum masyarakat bukan dengan melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *masalah khassah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan individu yang mengarah pada kebaikan yang bersifat kolektif.⁵⁴

⁵¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

⁵² Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory ", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

⁵³ Mohammad Hashim Kamali lahir 7 Februari 1944 adalah seorang sarjana Islam Afghanistan dan mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia.

⁵⁴ Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyyah Tatbiqiyyah Tutsbitu Salahiyyat al-Syari'ah li Kulli Zaman wa Makan*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M), h.338.

Husain Hamid Hisan menyimpulkan bahwa *maslahah* yang macam (*nau'*)-nya atau genus (*jins*)-nya tidak diakui oleh *nass* syara' merupakan *maslahah* yang palsu, yang ditolak; hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Seiring dengan itu, *maslahah* yang diyakini al-Tufi tidak berbeda dengan macam (*nau'*) *maslahah* yang palsu, yang ditolak tersebut; hanya ia lebih mengistimewakan dan mengutamakan *maslahah* ini ketimbang *nass* Syara' dan *Ijma'* ulama.⁵⁵

Berdasarkan teori *maslahah* yang peneliti paparkan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maslahah* yang rumuskan oleh Yusuf al-Qardhawi, karena peneliti menilai dengan menggunakan teori *maslahah* Yusuf al-Qardhawi dapat meninjau nilai kemaslahatan sebagai tujuan pensyariaatan secara holistik dari berbagai macam sudut pandang.

2. Kerangka Pikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

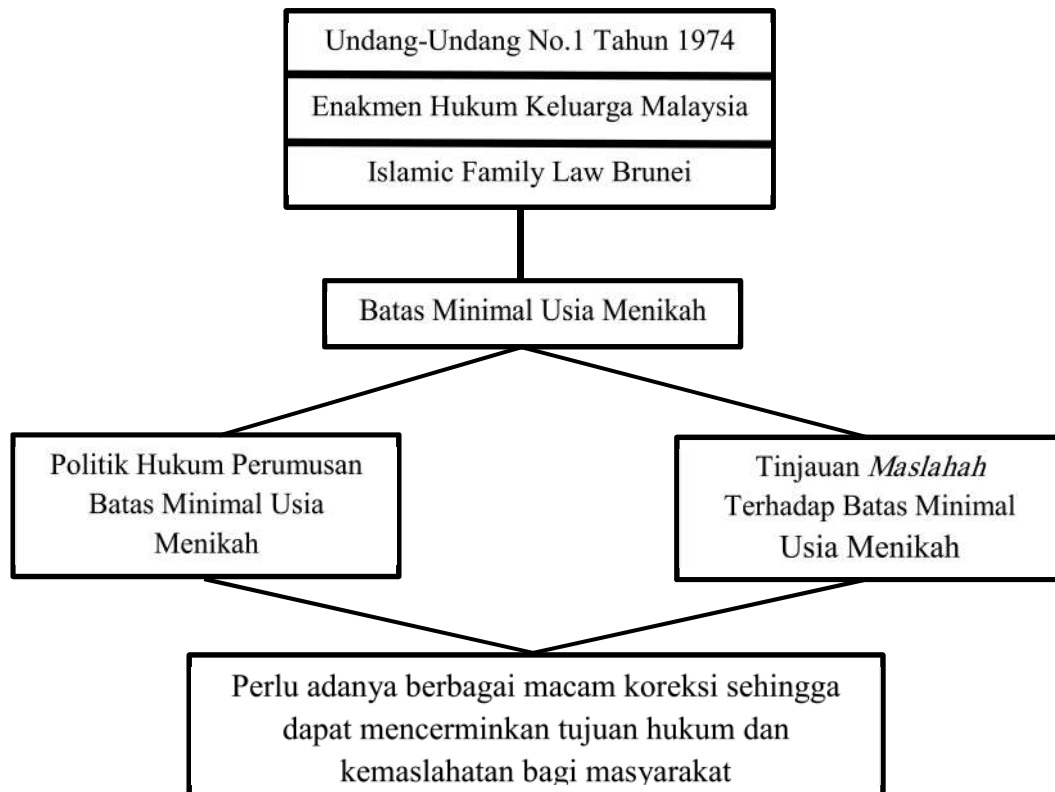
Hukum Islam termanifestasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah berbentuk Undang-Undang. Mayoritas negara yang mengadopsi hukum Islam dalam pembentukan Undang-Undang adalah negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam.

Seperti yang ada di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam merumuskan undang-undang perkawinan yang didalamnya juga terdapat peraturan mengenai batas minimal usia menikah.

Semua hal diatas dapat kita lihat pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) di Indonesia, Berbagai Enakmen bagian II seksyen 8 di Malaysia, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*) tertuang pada *Laws of Brunei* Bab 217 di Brunei Darussalam.

⁵⁵ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.608.

Dalam penelitian ini akan dikomparasi ketiga undang-undang tersebut untuk melihat kesamaan dan perbedaan. Lalu melihat secara historis yang melatarbelangi batas minimal usia menikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian meninjau dengan teori masalah terhadap batas minimal usia menikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini:



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Melalui pendekatan ini peneliti berupaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami batas usia perkawinan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan tidak mencukupkan

pada kajian norma-norma atau doktrin hukum yang ada di ketiga negara tersebut, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya melalui pendekatan yang ini peneliti berharap dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan.⁵⁶

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan data-data mengenai batas usia perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang peneliti dapatkan dari buku, tesis, disertasi, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan batas usia perkawinan.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunannya, tesis ini bersifat deskriptif komparatif yakni dengan menggambarkan peraturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam kemudian menjelaskan perbandingan antar tiga negara tersebut disertai dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Serta dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta mengenai batas usia perkawinan di ketiga negara tersebut secara faktual dan saksama.

3. Bahan Hukum

⁵⁶ Herlambang P. Wiratraman, "Good Governance Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legal", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, h.21-32

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h13.

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- a. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dengan membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (primer atau sekunder), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan analisis komparatif mengenai batas usia perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan menggunakan analisis komparatif peneliti dapat membandingkan fakta-fakta mengenai peraturan batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

BAB II

USIA PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Usia Perkawinan Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Kata perkawinan merupakan bahasa Indonesia yang diambil dari asal kata kawin, yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis (antara pria dan wanita), melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis atau bersetubuh.⁵⁸ Penggunaan kata kawin masih bersifat umum untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan yang memiliki makna yang menunjukan sebuah proses generatif secara general. Kata perkawinan juga terdapat dalam bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Kata perkawinan merupakan sinonim dari kata nikah⁶⁰ yang merupakan bahasa serapan dari kata dalam bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *mashdar* dari kata kerja *nakaha*. Secara bahasa kata *nikahun* berarti *al-dhamu* dan *al-jam'u* atau kumpul. Kata *nakaha* memiliki arti yang sama dengan kata *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.⁶¹ Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali sedan gka kata *tazawwaja* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan tidak kurang dari 80 kali.⁶²

Al-Qur'an dan hadis yang notabenenya merupakan sumber utama hukum Islam tidak menentukan secara konkret mengenai batas minimal usia menikah.

⁵⁸ Annimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994) h. 456

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁰ Dalam KBBI kata nikah berarti : ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

⁶² Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2004), h.15

Di dalam al-Qur'an terdapat 23 Ayat *munakahat* atau Ayat yang membahas mengenai perkawinan, akan tetapi tidak satupun ada dari Ayat-Ayat tersebut menyebutkan batas minimal usia menikah. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : dan ujilah⁶³ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Mujahid berpendapat kata حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (hingga cukup umur

untuk menikah) dalam Ayat tersebut maknanya adalah anak tersebut sudah *baligh*⁶⁴. Karena tidak ada satupun Ayat yang secara konkret mengenai batas usia *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan maka ulama mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan ini.

⁶³ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

⁶⁴ Seseorang yang telah mencapai kedewasaan diistilahkan dalam Islam dengan kata *baligh*. Yang secara bahasa berarti sampai. Maksudnya usia seseorang yang telah mencapai kedewasaan dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005),h.25

Mengenai *baligh*, fukaha mengatakan bahwa dalam pencapaian usia *baligh* seseorang dapat terjadi secara natural maupun dengan batasan umur. Secara natural dapat dilihat dari tujuh tanda, dua diantaranya khusus untuk wanita. Yaitu, keluar air mani⁶⁵, tumbuhnya rambut kasar sekitar kemaluan, suara yang menjadi kasar, tumbuhnya bulu ketiak, haidh dan hamil bagi wanita. Maksudanya ialah seseorang yang mencapai usia *baligh* dengan keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar ataupun bermimpi saat tidur dan bagi perempuan apabila ia telah mengalami *haidh*⁶⁶. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ " ⁶⁷

Artinya : Dari Ali, (bahwasannya) aku mendengar Nabi Saw., bersabda: diangkat pena (catatan amal) terhadap tiga hal: dari seseorang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dari orang gila hingga ia sadar (sembuh dari gilaanya)".

Tumbuhnya bulu kasar pada kemaluan sebagai tanda *baligh* di dasarkan dari hadis Nabi Saw,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْفَرُظِيَّ يَقُولُ: " عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فُرْطَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ، حُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَحُلِّيَ سَبِيلِي " ⁶⁸

⁶⁵ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz II (Mesir: Dar al-Kutub,tt.), h. 236.

⁶⁶ Jalaluddin al- Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), h. 98

⁶⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 254

⁶⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2001), h.67

Artinya : Menyampaikan kepada kami Waqi', menyampaikan kepada kami Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair berkata : aku mendengar 'Athiah al-Qurozhi berkata : “ Kami dihadapkan kepada Nabi Saw pada perang quraizhah. Ketika itu orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sementara yang belum tumbuh bulu kemaluannya tidak dibunuh. Dan aku termasuk yang belum tumbuh bulu kemaluannya.

Sedangkan haid dan hamil merupakan tanda seorang wanita telah *baligh* berdasarkan sabda Nabi Saw,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو الثُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»⁶⁹

Artinya: menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: Menceritakan kepada kami Abu al-Walid, dan Abu an-Nu'mani, Mereka berdua berkata : Menceritakan pada kami Hammad bin Salamah, dari Qotadah, dari Muhammad bin Sirrin, dari Shofiyyah bin al-Haritsi, dari 'Aisyah, dari Nabi Saw, Bersabda : Allah tidak menerima shalat wanita yang mengalami haid kecuali dengan penutup aurat.

Dalam batasan usia *baligh* Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia *baligh* bagi laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Imam Malik berpendapat *balighnya* anak pada usia 18 tahun. Imam Syafi'i mengatakan usia *baligh* seorang anak ialah mulai dari 9 tahun apabila ia mengalami keluarnya air mani, sedangkan apabila tidak seorang anak kecil akan baligh pada usia 15 tahun. Sedangkan mazhab hanabilah berpendapat sama persis seperti mazhab syafi'i.⁷⁰

⁶⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arobiyah, t.th), h.215

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 289

ابن عمر: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَلَمْ يَرِنِي بَلِغَتِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأُجَازِنِي، وَرَأَانِي بَلِغَتِ

Artinya : “Saya telah menghadap kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Jika kita amati, hadis-hadis yang telah dituliskan di atas tidak secara nyata atau konkret menentukan batas usia menikah akan tetapi hanya menyebutkan indikasi-indikasi kapan seseorang itu telah mencapai usia baligh.

Meskipun Ibnu katsir dalam tafsirnya memaknai lahfaz حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ memiliki makna bahwa *baligh* merupakan syarat bolehnya

seseorang menikah, imam empat mazhab memiliki pandangan berbeda bahwa *aqil* dan *baligh* bukanlah indikator untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan memperbolehkan anak yang masih kecil maupun orang gila dinikahkan oleh ayahnya.⁷¹ Pendapat ini didasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوَفِّيتُ حَدِيْجَةَ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 176

أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁷²

Artinya : Telah menyampaikan kepadaku Ubaid bin Isma'il, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya berkata : telah wafat Khadijah 3 tahun sebelum keluarnya Nabi Saw ke Madinah, dan menetap selama sekitar 2 tahun , dan menikahi Aisyah di saat ia berumur 6 tahun, kemudian menggaulinya ketika ia berusia 9 tahun.

Berbeda dengan pendapat Subrumah, Abu Bakar al-'Ashom, dan Utsman al-Bati yang dalam pendapatnya mencoba keluar dari makna tekstual hadis di atas dan mengatakan bahwa anak perempuan yang masih kecil dan perawan tetap tidak boleh dinikahkan hingga ia mencapai *baligh* dan ayahnya telah izin kepadanya untuk menikahnya, sesuai yang termaktub dalam ayat *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ*. Sedangkan Ibnu Hazm

berpendapat tidak boleh apa bila anak kecil tersebut yang mengadakan nikahnya sendiri apabila diakadnikahkan oleh walinya maka hukumnya boleh.⁷³

Muhammad Ali al-Shabuni dalam tafsirnya berpendapat indikator laki-laki *baligh* yaitu ketika laki-laki tersebut telah bermimpi, pendapat al-Shabuni ini senada dengan pendapat ulama fikih pada umumnya.⁷⁴ sedangkan ciri *baligh* bagi perempuan menurutnya yaitu ketika telah mengalami haid dan hamil.⁷⁵

Quraish Shihab menafsirkan lahfaz *rusydan* sebagai ketepatan dan kesempurnaan akal dan jiwa seseorang sehingga ia dapat bertindak dengan

⁷² Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 56

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 176

⁷⁴ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

⁷⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 153

tepat. Dalam tafsir karyanya al-Maraghi mengartikan kata *rusydan* yaitu ketika seseorang telah mampu menggunakan harta dengan membelanjakannya dengan sebaik-baiknya, sedangkan makna dari kata *balig al-nikah* adalah ketika seseorang mencapai umur telah siap menikah. Sedangkan Rasyid Ridha memaknai lahfaz *balig al-nikah* yaitu ketika seseorang telah bermimpi, dan bagi perempuan ketika ia dapat melahirkan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.⁷⁶ Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya memaknai lahfaz *rusydan* yaitu ketika seseorang telah cakap dalam pengelolaan harta dan tidak lemah atas tipuan orang lain.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa ulama klasik dan kontemporer tidak menentukan secara konkret mengenai usia perkawinan melainkan hanya menyebutkan indikator-indikatornya saja. Pendapat jumhur ulama termasuk imam empat mazhab berpendapat bahwa tidak ada batasan usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan dan boleh dinikahkan, sedangkan beberapa diantara ulama klasik seperti Subrumah, Abu Bakar al-‘Ashom, dan Utsman al-Bati berpendapat tidak boleh menikah atau dinikahkan hingga anak tersebut baligh.

B. Kajian Historisitas Usia Perkawinan Aisyah dengan Nabi Saw

Pembahasan mengenai batas usia perkawinan dapat dinilai cukup kompleks dan menuai adanya pro dan kontra didalamnya. Mereka yang pro terhadap perkawinan usia dini dengan merujuk kepada hadis yang termaktub dalam kitab *Shohih al-Bukhari* yang hampir semua ulama mengakui kredibilitasnya. Bahkan dikatakan bahwa kitab *Shohih al-Bukhari* dan kitab *Shohih Muslim* merupakan kitab yang paling diakui kebenarannya setelah al-Qur'an dan hampir semua umat muslim telah sepakat tentang itu.⁷⁸ Tentu saja

⁷⁶ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), 9

⁷⁷ Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, 140

⁷⁸ Muhammad bin Ahmad Thahan al-Na'imi, *Taisir Mustholah Hadits*, (Maktabah al-Ma'arif, 2004), h. 48

hal itu layak diutarakan karena Imam Bukhari dalam penyeleksian hadis-hadisnya dinilai ekstra hati-hati dan ketat (*tasyaddud*).

Akan tetapi anggapan bahwa kitab *Shohih al-Bukhari* merupakan kitab yang paling benar (*ashoh*) setelah al-Quran tidak berarti hadis-hadis yang termaktub dalam kitab tersebut tidak boleh dikritisi dan dikaji ulang dalam segi matan, perawi maupun historisnya. Dalam pembahasan ini peneliti akan mengkaji sacra historis mengenai hadis yang berkenaan dengan usia perkawinan ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad Saw.

‘Aisyah merupakan istri nabi yang memiliki banyak keistimewaan dari istri-istri nabi yang lain.⁷⁹ Keistimewaan itu terlihat dari sosok ‘Aisyah yang banyak hafal hadis-hadis nabi dibandingkan dengan istri-istri nabi yang lainnya. ‘Aisyah tercatat sebagai perawi hadis terbanyak ke-4 setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Tidak hanya itu, hubungan antara ayahnya dengan nabi sangat dekat bahkan ayahnya ikut serta menemani nabi saat berhijrah ke Madinah.⁸⁰ Ayahnya bernama Abu Bakar al-Shiddiq, dan ia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Zainab binti ‘Amir yang dikenal dengan panggilan Ummu Ruman⁸¹. Al-Thabari berpendapat bahwa ayah dan ibunda ‘Aisyah menikah sebelum ia memeluk Islam.⁸²

Banyak pendapat tentang kapan dilahirkannya ‘Aisyah, hal tersebut terjadi karena belum adanya tradisi pencatatan tanggal kelahiran di waktu itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ‘Aisyah lahir pada bulan Syawal 9 tahun sebelum peristiwa hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 M. Perhitungan tersebut berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Aisyah menikah pada usia 9 tahun.

Al-Thabari berpendapat Abu Bakar menikah menikahi dua orang wanita sebelum masuk Islam. Istri pertamanya bernama Qutaibah binti Abd al-‘Uzza dan istri ke duanya ibunda dari aisyah yaitu Ummu Ruman. Dari Qutaibah binti

⁷⁹ Mahmud Syalabi, *Hayat ‘Aisyah Umm al-Mu’minin*, (Beirut: Dar al-Jalil, 1998) h. 7

⁸⁰ ‘Aisyah Abdurahman bintu al-Syati’, *Nisa al-Nabi*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1971), h.61

⁸¹ Mahmud Syalabi, *Op.Cit.*, h. 9

⁸² Al-Thabari, *Tarikh Umam wa al-Muluk*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) h. 616

‘Abd al-Uzza melahirkan dua orang anak yaitu ‘Abdullah dan Asma’, sedangkan dari Ummu Ruman melahirkan Abdurahman dan ‘Aisyah. ‘Aisyah tidak memiliki anak, sedangkan Asma’ yang merupakan kakak seayah ‘Aisyah yang mempunyai anak bernama Hisyam yang banyak meriwayatkan hadis dari ‘Aisyah termasuk hadis yang mengatakan bahwa ‘Aisyah menikah dengan nabi pada usia 6 tahun, sebagian besarnya diriwayatkan oleh Hisyam.⁸³

Jika melihat pembahasan mengenai kritik hadis usia pernikahan ‘Aisyah yang menjadi titik permasalahan dalam kritik hadisnya adalah periwayatan dari Hisyam bin Urwah. Karena dari sekian banyak sahabat nabi di Madinah, tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali Hisyam bin Urwah dan yang menjadi kejanggalan lainnya hadis ini diriwayatkan Hisyam bin Urwah bukan saat dia masih bermukim di Madinah melainkan ketika ia telah bermukim di Iraq.⁸⁴

Kritik selanjutnya mengenai usia dan juga kredibilitas Hisyam bin Urwah sebagai periwayat hadis semenjak ia berada di Iraq. Diantara ulama yang mengkritik Hisyam bin Urwah adalah Imam Malik bin Anas yang dengan tegas menolak periwayatan Hisyam setelah ia bermukim di Iraq, pendapat ini dituliskan Ibnu Hajar al-‘Asqolani dalam *Tahdzib al-Tahdzib* yang juga berpendapat sama dengan Imam Malik bin Anas yang mengatakan Hisyam adalah orang yang dapat dipercaya ketika ia berada di Madinah dan tidak dipercaya periwayatan hadisnya ketika ia telah tinggal di Iraq. Ketidakpercayaan atas periwayatan Hisyam bin Urwah setelah ia berada di Iraq juga di sampaikan Ya’qub bin Syaibah karena hadis-hadis yang diriwayatkannya ketika di Madinah langsung dari ayahnya, akan tetapi ketika ia berada di Iraq periwayatannya mengatasnamakan ayahnya.⁸⁵

⁸³ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah ‘Aisyah menikah di Usia 9 Tahun?*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2015), h.116

⁸⁴ Loc, Cit.

⁸⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Tahdzi al-Tahdzib*, Jilid XI (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Islami, t.t), h. 50

Kemudian peneliti akan menguraikan dan mengerucutkan pembahasan mengenai hadis usia pernikahan ‘Aisyah dengan menggunakan pendekatan historis. Dalam kitab *Sirah Nabawiyah* tulisan Ibnu Ishaq dituliskan orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Dalam urutan yang pertama memeluk agama Islam, ‘Aisyah tercatat sebagai orang yang ke 18 memeluk agama Islam. Dengan perkiraan usia ‘Aisyah pada waktu itu sekitar 7 tahun. Dengan melihat catatan sejarah bahwa ‘Aisyah masuk Islam di masa awal kenabian yaitu pada saat nabi berusia 40 tahun dan menikah dengan nabi pada saat usia Nabi 51 tahun. Maka dapat dihitung usia ‘Aisyah pada saat menikah dengan nabi adalah 18 tahun dan kumpul dengan nabi pada saat usianya 21 tahun.⁸⁶ Akan tetapi kesimpulan ini menimbulkan pertanyaan baru, mengapa harus menunggu (3 tahun) umur 21 tahun untuk kumpul dengan Nabi Saw.

Kontradiksi itu juga terlihat dalam hadis yang mengabarkan dimana ‘Aisyah mulai dapat mengingat dan menyaksikan ayahnya Abu Bakar beribadah menurut ajaran Islam,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ.⁸⁷

Artinya : Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Bukair, Laits, dari ‘Uqail, berkata Ibnu Syihab : Meriwayatkan kepadaku ‘Urwah bin al-Zubair bahwasannya ‘Aisyah radhiyallah’anha istri nabi Saw berkata : sejak saya bisa mengingat saya menyaksikan kedua orang tua saya beribadah menurut agama Islam.

Penghitungan usia pernikahan ‘Aisyah dapat dilihat dari catatan sejarah yang ditulis Ibnu Hajar yang mengkaitkannya dengan tahun kelahiran Fatimah

⁸⁶ O. Hashem, *Benarkah ‘Aisyah Menikah dengan Rasulullah di Usia Dini?*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2009), h.64

⁸⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h.98

putri nabi. Dalam kitabnya *Ishobah fi Tamyiz al-Shohabah* Ibnu Hajar mengatakan Fatimah lahir pada saat ka'bah mulai dibangun kembali yaitu pada saat nabi berusia 35 tahun dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa usia 'Aisyah lebih muda 5 tahun dari usia Fatimah.⁸⁸ Maka dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa 'Aisyah lahir ketika nabi berusia 40 tahun, dan apabila nabi menikah dengan 'Aisyah pada umur 51 tahun berarti ketika itu usia 'Aisyah 11 tahun dan kumpul dengan nabi pada saat usia 14 tahun.

Hadis usia pernikahan 'Aisyah juga dikritisi dengan mengkaitkan jarak usia antara 'Aisyah dan Asma' yang merupakan kakak kandung 'Aisyah. Imam al-Zahabi mengutip pendapat dari Abdu al-Rahman bin Abi Zinad yang mengatakan bahwa Asma' usianya lebih tua 10 tahun dibandingkan dengan 'Aisyah. Dalam catatan sejarah Asma' meninggal pada saat usia 100 tahun pada tahun ke 73 Hijriah. Data tersebut menginformasikan bahwa Asma' berusia antara 27 atau 28 tahun ketika peristiwa hijrah. Maka dapat diketahui usia 'Aisyah 17 atau 18 tahun, pada saat peristiwa hijrah yang mana ia berumah tangga dengan nabi pada tahun yang sama.⁸⁹

Kejanggalan mengenai hadis 'Aisyah menikah di usia 6 tahun juga dapat terlihat dalam hadis yang menerangkan turunnya surat al-Qamar yang diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُسُفُ بْنُ مَاهَكٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: " لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ، {بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ} - القمر: 46⁹⁰

⁸⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *al-Ishobah fi Tamyiz al-Shohabah*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadits, 1978), h.337

⁸⁹ Ahmad Rajafi, "Reconsidering The Marriage Ages In Indonesia", dalam Jurnal *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

⁹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VI, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h.143

Artinya :Telah meriwalkan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah meriwalkan kepada kami Hisyam bin Yusuf, bahwasannya Ibn Juraij mengabarkan kepada merek, telah berkata: Telah mengabarkanku Yusuf bin Mahak, telah berkata: ketika itu aku bersama ‘Aisyah *ummul mu’minin*, ia mengatakan : Telah turun kepada Muhammad Saw di Mekah dan ketika itu aku adalah anak kecil yang suka bermain “sebenarnya hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

Sebagai mana yang tertulis dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. meneima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun menikah dengan Aisyah pada usia 51 tahun, dan dihitung bahwa Nabi Muhammad Saw. menikah setelah 11 tahun dari awal wahyu pertama turun. Sedangkan rata-rata pada usia anak dapat mengingat ketika menginjak usia 4 tahun. Berdasarkan analogi tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan Aisyah terjadi ketika ia berusia 14 tahun.

Dari data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kajian historis hadis usia perkawinan Aisyah dengan nabi kontradiktif apabila disinkronkan dengan berbagai catatan sejarah dan terdapat pula kritik sanad terhadap hadis tersebut.

C. Usia Perkawinan di Negara Muslim Modern

Negara-negara muslim berbeda-beda dalam menetapkan batasan usia menikah. Perbedaan penetapan batasan usia menikah di setiap negara dilatarbelakangi oleh pemahaman agama, tradisi, dan kondisi sosio-kultural. Pembaruan-pembaruannya pun dilatarbelakangi oleh eksistensi kebijakan negara-negara yang pernah penjajah, organisasi ulama dan kepemimpinan, dan perkembangan pendidikan Islam di negara yang bersangkutan.⁹¹

Cara perumusan dan penerapan hukum keluarga di berbagai negara yang mengadopsi hukum Islam bervariasi⁹², sebagian menerapkannya secara konvensional dengan mengikuti adat, kebiasaan, dan kelaziman yang berlaku di negaranya. Negara-negara yang mengadopsi dan menerapkan hukum keluarga

⁹¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 3

⁹² YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), h. 17

secara konvensional antara lain yang berada di Timur Tengah yaitu Yaman, Arab Saudi, Afganistan, Kuwait, dan yang berada di wilayah Afrika antara lain Nigeria, Mali, Mauritania, Somalia, dan Sinegal.

Terdapat juga negara Islam yang perumusan dan penerapan hukum keluarganya dengan cara sekular yang di mana negara tersebut melepaskan diri dari keterkaitan agama-agama dalam merumuskan dan menerapkan undang-undang hukum keluarganya. Negara yang termasuk menerapkan hukum keluarga secara sekuler antara lain Albani, Turki, Tanzania, dan minoritas dari penduduk muslim di Philipina.

Pembaruan hukum keluarga Islam juga diterapkan di beberapa negara Islam. Pembaruan di negara-negara ini dilakukan secara substansif dan diterapkan di undang-undang. Negara yang menerapkan pembaruan hukum keluarga antara lain yang berada di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan di wilayah Timur Tengah seperti Mesir dan Libanon.

Kematangan dan kedewasaan calon mempelai merupakan asas yang paling penting dalam menentukan batas usia perkawinan di setiap negara. Kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan fisik (*jasadiyah*) kedua calon mempelai, juga kematangan psikis (*ruhaniyah*) kedua calon mempelai.⁹³ Peneliti akan menyajikan perbedaan batasan usia menikah yang ada di berbagai negara, dan menyusunnya dimulai dari batas usia menikah laki-laki yang paling tinggi. Berikut tabel perbandingan usia perkawinan di berbagai negara :

No	Negara	Batas Usia Pria	Batas Usia Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18

⁹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h. 27

3	Israel	20	19
4	Indonesia	19	19
5	Tunisia	19	17
6	Somalia	18	18
7	Irak	18	18
8	Syiria	18	17
9	Ciplus	18	17
10	Libanon	18	17
11	Malaysia	18	16
12	Mesir	18	16
13	Libya	18	16
14	Pakistan	18	16
15	Yaman Selatan	18	16
16	Maroko	18	15
17	Turki	17	15
18	Yordania	16	15
19	Yaman Utara	15	15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sosio-kultural yang ada di setiap negara.

D. Sebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Praktik perkawinan di bawah umur pada berbagai negara di dunia setiap tahunnya terus bertambah. Berbagai upaya dalam perlindungan hukum anak belum dapat menekan angka perkawinan di bawah umur pada anak. Pada tahun 2015, terdapat 142 juta anak (perempuan) yang melakukan perkawinan di bawah umur.⁹⁴ Ethiopia tercatat sebagai negara yang memiliki angka tertinggi dalam praktik perkawinan di bawah umur. Angka tersebut juga terus mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa negara benua Afrika, Asia Barat Daya, India dan lain-lain. Yang menjadi alasan pada praktik perkawinan di bawah umur adalah tradisi yang melekat, faktor ekonomi, dan paham agama. Padahal sudah banyak penelitian yang mengungkapkan akan dampak negatif dari praktik perkawinan di bawah umur.

Peningkatan angka perkawinan di bawah umur juga terjadi di negara Indonesia. Di negara Indonesia angka perkawinan di bawah umur mencapai 1,5 juta anak perempuan, undang-undang perkawinan yang memberlakukan 19 tahun sebagai usia minimum pernikahan belum dapat membendung praktik perkawinan di bawah umur yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut hitungan *universal* ada sebanyak 720 juta wanita yang masih dalam status hidup yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan perkiraan rata-rata melakukan perkawinan pada 15 tahun.⁹⁵

Pernikahan dibawah umur yang sering terjadi salah satunya karena adanya persepsi yang sangat kuat dari orang tua anak mengenai suatu konsep pernikahan dibawah umur yang dilakukan anak perempuan. Emmanuel A.

⁹⁴Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?", dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, h. iii-v

⁹⁵ Sophia Chae dan Thoai D. NGO. "The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage", dalam *Girl Center Research Brief*, No. 1, Oktober 2017.

Agege dan beberapa peneliti lainnya telah melakukan penelitian mengenai konsep pernikahan dini yang berbeda-beda, dengan meminta tanggapan responden akan usia di bawah 18 tahun ke bawah dikatakan sebagai usia di bawah umur dengan tanggapan responden 63% sangat setuju dan 30% setuju, pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan remaja sebesar dengan tanggapan responden 53% sangat setuju dan 37% setuju, pernikahan di bawah umur sebagai bentuk pelanggaran terhadap anak perempuan dengan tanggapan responden 46% sangat setuju dan 33%. Dari penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel A. Agege dan beberapa peneliti lainnya banyaknya ketidaksepahaman responden mengenai persepsi pernikahan dini.

Sebanyak 60% dari total responden belum mengakui adanya diskriminasi gender terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Bahkan sebanyak 77% dari total responden mengakui akan ketidaktahuannya mengenai sebab akibat dari praktik perkawinan di bawah umur. Dari ketidaktahuan tersebut berdampak pada anak-anak perempuan yang tidak diberi pengetahuan yang seyogianya mereka dapatkan. Dengan sebab itu timbullah gaya hidup yang tidak bermoral yang menyebabkan anak perempuan hamil sebelum terjadinya perkawinan yang sah.⁹⁶

Perkawinan di bawah umur juga telah menjadi fenomena di negara Indonesia. Faktor budaya memiliki pengaruh terbesar pola kehidupan masyarakat, termasuk pada praktik perkawinan di bawah umur. Praktik perkawinan di berbagai etnis, menunjukkan adanya masalah perkawinan di bawah umur sangat perlu untuk diperhatikan. Di Asia Tenggara Indonesia menempati urutan ke-2 dalam jumlah pernikahan di bawah umur, dan di tingkat dunia pada urutan ke-37.⁹⁷ Tentunya hal ini bukanlah prestasi karena

⁹⁶ Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", dalam *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018, h. 3189

⁹⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 sudah menikah (BKKBN).

berpotensi pada angka kelahiran yang tinggi pula.⁹⁸ Sejatinnya konsep perkawinan merupakan sebuah akad yang mengakibatkan halalnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berdasarkan dengan ketentuan syara',⁹⁹ namun dalam perkawinan di bawah umur, seringkali terjadi kesepakatan yang ada bukan terletak pada pihak anak akan tetapi karena kemauan orangtua dari anak tersebut.

Fenomena perkawinan di bawah umur sangat penting untuk diperhatikan khususnya di Indonesia. Dalam sebuah penelitian di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menyatakan praktik perkawinan di bawah umur telah menjadi eksistensi di sana. Tidak hanya itu, perkawinan di bawah umur mendapat positif di tengah masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Anggapan masyarakat disana perkawinan di bawah umur merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang yang hendaknya tetap dilestarkan. Adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batasan minimal usia perkawinan tidak diabaikan. Menurut data pernikahan di bawah rata-rata dilakukan oleh anak yang usianya di bawah 16 tahun, yang mayoritas berusia antara 13-15 tahun.¹⁰⁰

Handayani memaparkan dalam penelitiannya di Kecamatan Tambusi Utara Kabupaten Rokan Hulu bahwa angka perkawinan di bawah umur sangat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor baik yang terlihat memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan. Yang memiliki hubungan statistik sebab akibat yang signifikan dan berturut-turut yaitu pendidikan remaja, pekerjaan

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja. Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan), dalam *Privat Law*, Vol. V No 2 Juli Desember 2017, h. 70.

⁹⁸ Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 1.

⁹⁹ Muhammad Nabil Khazim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo : Samudera, 2007), h. 25.

¹⁰⁰ Siti Munawwaroh, Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam, dalam *Intelektulita*, Vol.5. No.1. Juni 2016

orang tua, lingkungan remaja, pengetahuan remaja. Sedangkan, faktor yang memiliki hubungan statistik tidak signifikan adalah keadaan ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua .¹⁰¹

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur. :

1. Faktor Ekonomi, yaitu keadaan dimana orang tuanya anak kesulitan dalam hal ekonomi, juga terkadang karena terlilit hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya hingga mengorbankan anaknya untuk dikawinkan ketika masih di bawah umur sebagai hutangnya, keadaan ini persis seperti salah satu pemohon *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dinikahkan orang tuanya karena faktor terlilit hutang. Hal ini juga yang dapat menyebabkan tingkat rendahnya tingkat pendidikan wanita, karena dipaksa untuk menikah daripada meneruskan pendidikannya.
2. Faktor pendidikan, yaitu mengenai pola pikir masyarakat, baik dari orang tua maupun anak yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah akan cenderung melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Beda halnya dengan masyarakat yang berjenjang pendidikan, dengan mengetahui berbagai dampak negatifnya cenderung tidak melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian pada seseorang, melalui suatu pendidikan masyarakat akan lebih merespon dan menerima suatu informasi yang sifatnya baik, dan menyaring hal positif dan negatif yang terdapat di lingkungan mereka.
3. Faktor kemauan sendiri, ini merupakan salah satu faktor yang sulit untuk dihindari, keadaan ini terjadi dimana pria dan wanita mempunyai hubungan cinta tanpa mempertimbangkan usia mereka juga tidak mempertimbangkan dampak dari perkawinan di bawah umur. Faktor

¹⁰¹ Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203

kemauan sendiri ini berkaitan erat dengan faktor pendidikan yang buruk, dengan minimnya pengetahuan dan informasi keinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur itu terjadi.

4. Faktor pergaulan bebas, yaitu keadaan dimana orang tua kurang perhatian dan bimbingan terhadap anaknya. Keinginan anak untuk bersenang-senang tanpa batas dengan mencari cara agar mereka dapat merasakan kebahagiaan, dengan pergaulan yang salah (bebas) yang berujung pada hubungan di luar ikatan perkawinan sehingga mau tidak mau orang tua anak akan memberikan izin kepada anaknya yang pada dasarnya belum masih belum cukup umur dan belum mampu menerima amanat sebuah perkawinan.¹⁰²
5. Faktor adat dan lingkungan, dalam sebagian adat pernikahan sering terjadi adalah karena sejak anak masih kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya. Beberapa ketentuan adat mengatakan pernikahan usia anak terjadi dengan tujuan menjalin hubungan kekeluargaan antara kerabat dari pihak mempelai laki-laki dan kerabat dari pihak mempelai perempuan yang memang telah direncanakan, hal tersebut dilakukan agar hubungan kekeluargaan antar kerabat kedua mempelai tidak putus. Selain itu, kekhawatiran orang tua pada anaknya yang telah berusia remaja, menyebabkan orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor lingkungan juga berpengaruh pada praktik perkawinan di bawah umur, ada umumnya orang tua yang tinggal di daerah pedesaan ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan menjadi perawan tua.¹⁰³

¹⁰² Siti Munawwaroh, *Op.Cit*

¹⁰³ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, dalam *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016.

6. Faktor media massa, dengan banyaknya ekspose tentang seks yang ada di media berakibat pada remaja modern yang kian permisif terhadap seks.¹⁰⁴ Bahkan pada era digital saat ini, berbagai konten seks sangat mudah didapat melalui gadget yang digunakan oleh anak. Tentunya faktor ini berkaitan erat dengan faktor pendidikan, lingkungan dan pengetahuan serta kontrol orang tua terhadap anaknya.¹⁰⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini banyak ditimbulkan dari bermacam-macam faktor. Padahal telah banyak penelitian yang mengungkapkan akan dampak negatif dari perkawinan usia dini bagi anak.

E. Dampak Negatif Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Sosialisasi akan dampak perkawinan usia dini telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan lain-lain ke masyarakat secara luas. Akan tetapi upaya ini belum dapat menekan angka perkawinan di bawah umur secara signifikan. Pada tahun 2010 data *United Nations Development Economic dan Social Affairs* (UNDESA) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi ke-37 di tahun 2007. Di wilayah Asia Tenggara Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi ke-2 setelah Kamboja.¹⁰⁶ Upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepekaan masyarakat, dan mendidik anak terutama anak perempuan dapat

¹⁰⁴ Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya", dalam *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April 2013, h. 207

¹⁰⁵ Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," dalam *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929, h 1-8.

¹⁰⁶ Hasan Bastomi, "Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

meminimalisir konsekuensi buruk dari dilakukannya pernikahan di bawah umur.¹⁰⁷

Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik perkawinan di bawah umur :

1. Dampak terhadap kesehatan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan anak.¹⁰⁸ Karena pada usia tersebut seorang anak belum memiliki kesiapan fisik untuk mengandung dan melahirkan. Seorang yang masih di bawah umur atau belum memiliki kematangan fisik ketika ia melahirkan terdapat potensi besar pada cacat dan kematian baik pada ibu yang mengandung dan melahirkan maupun pada anak yang dikandungnya.¹⁰⁹

Pada tahun 2011 Plan Indonesia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada melakukan penelitian bersama mengenai “Praktik Pernikahan Dini di Indonesia” penelitian ini dilakukan di delapan lokasi di Indonesia yaitu Grobogan, Indramayu, Tabanan, Rembang, Sikka, Dompu, Timur Tengah Selatan (TTS), dan Lembata. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan di delapan wilayah tersebut yaitu pada usia 16 tahun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan banyaknya dampak negatif pada praktik perkawinan di bawah umur, salah satunya yang paling menonjol adalah dampak negatif terkait dengan kesehatan reproduksi.

Pada setiap wilayah penelitian ditemukan resiko kehamilan tinggi pada anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Selain

¹⁰⁷ Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi Supriyadi. “Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City”, dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 5 No. 2, April, 2018, h. 336

¹⁰⁸ Dampak negatif perkawinan di bawah umur dalam aspek biologis antara lain kerusakan organ reproduksi, hamil usia muda, dan aspek pada psikologis antara lain ketidakmampuan seorang anak dalam menjalankan fungsi reproduksi dengan baik. Lihat : Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 57.

¹⁰⁹ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo - Madura , h. 4

berdampak pada kesehatan anak perkawinan usia dini juga member dampak pada kesehatan mental, dengan adanya beban yang ditanggung bisa berdampak pada stres karena mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur secara psikis belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang tua.¹¹⁰

2. Dampak Terhadap Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu hal penting bagi keberlangsungan rumah tangga. Salah satu alasan terjadinya dalam perkawinan di bawah umur adalah karena faktor ekonomi. Akan tetapi pemecahan masalah ekonomi dengan melakukan perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sia-sia. Ketidaksiapan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur malah berakibat pada ekonomi keluarga yang memburuk.

3. Dampak Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dampak negatif dilakukannya perkawinan di bawah umur ialah adanya potensi besar terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Plan mengatakan dalam sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur mengalami kasus KDRT dan ini termasuk dalam frekuensi tinggi. Sedangkan sebanyak 56% lainnya yaitu mereka yang tidak menikah di bawah umur mengalami KDRT pada tingkat frekuensi yang tergolong rendah¹¹¹

Terjadinya KDRT disebabkan karena sifat emosional yang belum stabil pada usia di bawah umur yang berakibat pada pengendalian emosi belum stabil. Dalam membangun sebuah rumah tangga pasti terdapat sebuah problem yang hendaknya diselesaikan yang menuntut sikap kedewasaan dari anggota keluarga dalam penanganannya, karena keharmonisan sebuah rumah tangga tidak hanya tentang ekonomi belaka tetapi juga tentang

¹¹⁰ Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, h. 2

¹¹¹ *Loc.Cit*

kesiapan mental dan kedewasaan anggota keluarga dalam mengarunginya. Dan yang sering terjadi pada perkawinan di bawah umur yaitu pasangan yang tidak mampu menyelesaikan problem yang ada dalam internal keluarga sehingga mengarah pda hilangnya keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian keluarga.¹¹²

4. Dampak Terhadap Perceraian

Perceraian pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur juga banyak terjadi di masyarakat. Perceraian ini terjadi pada pasangan suami isteri yang terhitung usianya masih muda, dan dalam usia perkawinan yang masih muda pula yaitu masih dalam hitungan bulan. Dikarenakan belum matangnya jiwa mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah dan tidak siap dari segi mental maupun fisik saat menjalankan kehidupan berumah tangga rentan terhadap konflik, yang pada akhirnya memutuskan untuk cerai.

Penelitian tentang dampak perceraian juga pernah dilakukan Abe Sohpihan Abdul Rahman, Zuliza Mohd Kusrin, dan Anwar Fakhri Omar tentang faktor perceraian di mahkamah syariah bahagian mukah, sarawak dari tahun 2000 hingga 2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan di usia muda adalah faktor-faktor pendorong (eksternal) dari kasus perceraian sedangkan kurangnya tanggungjawab merupakan faktor utama (internal).¹¹³

5. Dampak Terhadap Pendidikan

Seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tentunya akan berdampak negatif terhadap pendidikan formalnya. Contohnya apabila anak melakukan perkawinan ketika baru lulus pada jenjang pendidikan SMA atau SMA maka ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Hal itu terjadi karena redunya motivasi belajar seorang anak

¹¹² Fransiska Limantara, *Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan*, <http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/>

¹¹³ Abe Sohpihan Abdul Rahman, "Faktor Perceraian Di Mahkamah Syariah Bahagian Mukah, Sarawak dari Tahun 2000 hingga 2010" dalam *Jurnal Islamiyyat* Vol. 36(1) 2014.

yang melakukan perkawinan di bawah umur. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap pendidikan dan pembelajaran seorang anak.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*, h.3

BAB III

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Hukum Keluarga di Indonesia

1. Potret Negara Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan, dapat dikatakan demikian karena seluruh dari wilayah Indonesia baik daratan maupun lautan merupakan bagian dari negara Indonesia itu sendiri, sedangkan keseluruhan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang berada dibawahnya diberi sebagian wewenang oleh pemerintahan pusat untuk diatur secara otonom.¹¹⁵

Dilihat dari letak geografisnya Indonesia merupakan negara kesatuan yang komponen wilayah negaranya terdiri dari lautan, daratan dan udara, dimana dua per tiga komponen wilayahnya adalah berupa lautan. Dikarenakan memiliki pulau sebanyak 16.056 yang tersebar di seluruh wilayahnya Indonesia mendapat julukan sebagai negara kepulauan. Walaupun sebagian besar wilayah negara Indonesia merupakan lautan akan tetapi antara komponen lautan, daratan maupun udara terdapat sifat kesatuan alami yang berdasarkan ilmu ekologis ini merupakan dalil adanya kesatuan seluruh wilayah Indonesia secara geografis yang kemudian menjadi kesatuan budaya, ekonomi, politis, pertahanan, dan juga keamanan.¹¹⁶

Negara Indonesia poros maritimnya menghubungkan antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan juga menghubungkan dua samudra yaitu benua Pasifik dan Hindia. Di lautnya negara Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangganya yaitu Malaysia, Thailand,

¹¹⁵ Ni'matul Huda, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Negara Federalisme atau Kesatuan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 22

¹¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Jakarta : Bina Cipta, 1987), h.

Vietnam, Singapura, Filipina, Kepulauan Papua, Papua Nugini, India, Australia dan Timor Leste, serta di wilayah daratnya Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan RDTL (Republik Demokratik Timur Leste).¹¹⁷

Dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang sangat kompleks, luas, dan beragam dan juga kondisi sosio-kultural di Indonesia, Indonesia termasuk salah satu negara multikultural terbesar yang ada di dunia. Karena kondisi negara Indonesia yang multi etnis, kultur dan agama, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang plural. Walaupun pluralitas tersebut sangat berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan, Indonesia memiliki semboyan pemersatu yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya bahwa walaupun Indonesia sebagai negara yang plural dan heterogen akan tetapi masih terintegrasi dalam satu kesatuan.¹¹⁸

Dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2010 tercatat Indonesia memiliki sekitar 237 juta penduduk yang 87% memeluk agama Islam dan yang lainnya memeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu, dan lain-lain. Selain penduduk asli Indonesia juga terdapat penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas antara lain etnis Tionghoa, India dan Arab. Yang menurut catatan sejarah sudah datang sejak abad ke-8 melalui jalur perdagangan.¹¹⁹

2. Kodifikasi Hukum Keluarga di Indonesia

Histori cikal bakal kodifikasi Undang-undang Perkawinan Indonesia dimulai sejak era kerajaan Hindu Budha maupun kerajaan Islam. Dibuktikan dengan adanya catatan sejarah Kerajaan Majapahit tentang kebijakan patih Gajah Mada dalam membagi dan membidang-bidangi tugas-tugas

¹¹⁷ Harmen Batubara, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara*, (Bandung : Wilayah Perbatasan, 2016), h. 8

¹¹⁸ Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara" dalam *Jurnal Pendidikan dan Pancasila*. Vol. 28, No. 1, Februari 2015

¹¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut*, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> akses internet tanggal 7 Januari 2020 jam 10.27 WIB

pemerintahan maupun tugas yang berkaitan dengan keamanan negara. Pembidangan tugas negara pada saat itu antarlain adalah bidang perkawinan, keamanan, peralihan kekuasaan dan lain-lain. Pada era kerajaan juga ditemukan bukti sejarah berupa jayasong (jayapatra) yang pada saat ini bentuknya sama dengan putusan pengadilan. Pada era Gajah Mada juga ditemukan bukti adanya kitab undang-undang berupa kitab hukum yang dibuat pada era Gajah Mada.¹²⁰

Pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan hindu budha di Indonesia berdirilah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam mulai masuk dan menyebar ke wilayah Nusantara abad ke-7 dalam hitungan tahun masehi dan bertepatan tahun pertama dalam hitungan tahun hijriah. Pada masa itu wilayah-wilayah yang berada di Nusantara dipegang kendali oleh sultan dan diberlakukan pula hukum Islam dan sultan selaku penanggung jawabnya. Sultan menunjuk penghulu untuk mengemban tugas sebagai *qadhi syariah* dan juga memberi fatwa keagamaan pada saat itu. Output dari kebijakan ini dapat terlihat dengan adanya lembaga pemasyarakatan, pendopo, dan masjid agung yang ada di sekeliling alun-alun. Dengan adanya catatan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa hukum Islam di Nusantara telah dilaksanakan sejak masa kerajaan bercorak Islam berdiri di bumi Nusantara.¹²¹

Kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 M, yang tersebar di banyak wilayah Nusantara dari Sumatera, Jawa hingga wilayah Nusantara bagian timur. Kerajaan Samudera Pasai yang terdapat di pulau Sumatera menganut paham agama bermazhab Syafi'i dalam penerapan hukumnya.¹²² Kemudian di Jawa terdapan beberapa kerajaan antara lain Kerajaan Gersik, Kerajaan Demak, Kerajaan Ngampel,

¹²⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004).h. 99

¹²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012). h. xi

¹²² Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 2010). h. 53

Kerajaan Tuban, dan Kerajaan Jepara.¹²³ Kemudian pada wilayah timur Nusantara terdapat kerajaan-kerajaan Islam contohnya kerajaan Bima, Ternate, Gowa dan lain-lain. Masyarakat Islam yang tersebar pada wilayah Nusantara diperkirakan berpaham agama mazhab Syafi'i dalam penerapan hukumnya.¹²⁴ Pada era kerajaan Islam ini penghulu ditunjuk oleh sultan untuk melaksanakan fungsi memelihara agama dan menjaga berlangsungnya hukum Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk urusan perkawinan. Fungsi penghulu ini juga dibantu oleh staf-staf penghulu yang ditunjuk kerajaan.¹²⁵

Setelah lewat masa kerajaan Islam sebagai priode cikal bakal dikodifikasikannya hukum keluarga Islam dilanjutkan era kolonial Belanda. Tepatnya pada tahun 1596 M tercatat dengan jalur VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) Belanda memasuki wilayah Nusantara. VOC datang ke Nusantara dengan membawa hukum mereka sendiri dengan tujuan untuk mengadili diantara mereka, kemudian niatan tersebut berubah demi memantapkan posisinya VOC dalam upayanya menerapkannya hukum serta peradilan yang telah di konsep oleh VOC ke wilayah yang mereka jajah pada saat itu. Dan pada akhirnya Belanda melegalkan untuk tetap berlakunya sistem peradilan terdahulu karena menilai sistem peradilan dan hukum yang mereka coba terapkan tidak berjalan.¹²⁶

VOC kemudian mengeluarkan kebijakan agar tetap dilaksanakannya kebijakan-kebijakan sultan yang telah berlaku dan keseua itu diakui resmi oleh VOC. Tidak hanya itu bahkan VOC memberikan kebebasan bahkan memfasilitasi agar hukum Islam tetap terus berkembang seperti yang telah berlaku sebelumnya. Menerbitkan buku panduan hakim merupakan salah

¹²³ *Ibid.*, h. 145.

¹²⁴ Mawarti Djoned Poesponegoro, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004). h.197

¹²⁵ Amrullah Ahmad SF, dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006). h. 70

¹²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006). h. 49-

satu contohnya, VOC melegalkan hal tersebut dan ikut membantu memfasilitasinya. Kitab yang diterbitkan untuk pedoman hakim peradilan agama *al-Muharror* yang dicetak di Semarang, Kitab *Shirath al-Mustaqim* karangan Syekh Nuruddin al-Raniry yang kemudian kitab tersebut ditambahkan penjelasan (*syarh*) oleh Syekh Arsyad al-Banjari dan diberi nama *Sabil al-Muhtadin* yang sengaja dibuat untuk Kerapatan Kadi di Banjarmasin, dan juga kitab *Sajirat al-Hukm* yang dipakai Mahkamah Syar'iah yang berada di Kesultanan Gersik, Demak, Jepara, dan Mataram.¹²⁷

Selanjutnya D.W Freijer yang merupakan utusan dari VOC membentuk peraturan yang berdasarkan hukum Islam dan diberi nama *Compendium Freijer*.¹²⁸ Tidak hanya itu, Belanda juga membukukan hukum perkawinan dan kewarisan yang diintisarikan dari hukum Islam yang kemudian diterapkan di Makasar (Gowa dan Bone), Cirebon, juga di Semarang.¹²⁹

Upaya mengganti hukum terus dilakukan Belanda hingga berakhirnya masa kejayaan VOC yang direbut Inggris pada tahun 1800 hingga 1811, kemudian Inggris menyerahkan kembali kekuasaan tersebut pada Belanda yang kemudian Belanda kembali melakukan berbagai upaya untunk tetap mengganti hukum yang berlaku dengan hukum Belanda. Upaya tersebut tidak berhasil diterapkan di Indonesia. Kemudian muncullah teori yang dikeluarkan L.C.W Van Den Berg yang merupakan asli berkebangsaan Belanda. Teori tersebut dikenal dengan nama *Receptio in Complexu* teori ini mengatakan bahwa bagi orang Indonesia asli berlaku hukum agama mereka, yang mana maksud dari hukum agama ini adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Pada tahun 1855 teori ini dikuatkan dengan berlakunya

¹²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012). h. xi

¹²⁸ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011). h. 11

¹²⁹ Muhammad Daud Ali, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan* , Volume 2, No. XII (Maret 1982). h 101

undang-undang Hindia Belanda pada Pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).¹³⁰

Di tengah berjalannya teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh L.C.W Van Den Berg, muncullah teori baru sebagai teori kontra yang digagas oleh Cristian Snouck Hurgronje. Teori ini dikenal dengan sebutan teori *Receptie* yang pada intinya teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat dan bukan hukum Islam sebagaimana yang dikatakan L.C.W Van Den Berg.¹³¹ Dengan adanya gagasan baru yang dimunculkan oleh Cristian Snouck Hurgronje ini, eksistensi hukum yang bersumber dari ajaran Islam tergantikan dengan hukum dari berbagai adat yang terdapat di Nusantara. Berlakunya huku adat ini diperkuat dengan adanya Indesche Staatsregeling pada Pasal 131 Ayat 6, tertulis didalamnya bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat, dan hukum adat ini berlaku sampai ditulisnya peraturan-peraturan bagi warga negara Indonesia yang dituang dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.¹³²

Berlakunya teori *Receptie* ini dinilai merugikan umat Islam karena menghambat berlakunya hukum Islam yang ada di daerah-daerah, walaupun di sebagian daerah sudah menjadikan hukum Islam sebagai hukum adatnya akantetapi masih banyak daerah yang belum menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat. Yang sangat dirugikan adalah mereka yang beragama Islam yang tinggal di daeah mayoritas non muslim, dengan berlakunya teori ini mereka hendaknya mengikuti hukum adat setempat. Pemberlakuan hukum adat atas teori *Receptie* ini tidak menghapuskan wewenang Pengadilan Agama yang pada saat itu dinamakan *Penghoeluegerecht* dalm urusan pernikahan.

¹³⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.52

¹³¹ *Ibid.*, h. 54

¹³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2007), h. 11

Indesche Staatsregeling (IS) Pasal 131 Ayat 2 menyatakan bahwa masyarakat berbangsa Indonesia asli dan masyarakat Timur Asing dapat merujuk pada peraturan-peraturan yang diperuntukkan bagi yang berkebangsaan Eropa dalam hukum perdatanya (*Burgerlijk Wetboek*), baik mengikutinya secara utuh ataupun dengan adanya perubahan-perubahan. Selanjutnya terdapat dalam Ayat 4 bahwa orang berkebangsaan Indonesia asli dan orang dari Timur Asing, diperbolehkan untuk mengikuti hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa hingga diwajibkannya untuk tunduk kepada peraturan bersama yang disepakati bangsa Eropa.¹³³

Peraturan tersebut memiliki arti bahwasannya siapapun dapat tunduk dan mengikuti undang-undang Eropa yang berlaku, baik dikarenakan kehendak dari pribadi mereka sendiri ataupun kesepakatan bersama. Juga dapat diartikan bahwa masyarakat yang beragama Islam boleh dan dapat melangsungkan pernikahan acuan hukum yang tertera di BW sebagai dasar hukumnya. Sedangkan dalam BW sendiri tidak ada aturan mengenai hukum nikah bagi yang berbeda agama. Dan dapat disimpulkan diperbolehkannya masyarakat yang beragama Islam mengikuti BW dalam hukum perkawinan membuka celah untuk berlangsungnya nikah beda agama dan membuka kemungkinan pemurtadan melalui perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dua Pasal diatas upaya kolonial Belanda dalam menundukan kepada hukum mereka, untuk secara perlahan membendung kemungkinan adanya pemberontakan apabila eksistensi hukum Islam yang sebelumnya ada terus berkembang dan mengancam keberadaan kolonial Belanda di kemudian hari.

Pengusulan undang-undang perkawinan pertama kali dilakukan pada saat digelarnya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 tepatnya tanggal 25 sampai dengan tanggal 25 Desember, akan tetapi usul tersebut ditunda karena dikhawatirkan akan menghambat upaya bangsa

¹³³ *Ibid.*, h.12

Indonesia dalam mengusir para penjajah bangsa.¹³⁴ Pemerintahan Hindia Belanda pada awal tahun 1937 mulai merancang dan menyusun pendahuluan Ordonansi Perkawinan (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) yang dalam salah satu asasnya adalah asas perkawinan monogami dan status pernikahan hilang dengan sebab salah satu dari suami dan istri meninggal atau kabur dan tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun juga dengan dinyatakan cerai dan diputuskan oleh hakim yang berwenang.¹³⁵ Rancangan ordonansi tersebut dengan tegas ditolak organisai Islam karena rancangan tersebut diperuntukkan bagi pemeluk ajaran Islam dan Hindu dimana isinya dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikarenakan tidak kuatnya dukungan kaum ibu akan rancangan rencana ordonansi, maka rencana tersebut gagal dibahas di dewan rakyat (*Volksraad*).¹³⁶

Hingga akhir masa penjajahan kolonial Belanda undang-undang perkawinan yang dikhususkan bagi pemeluk agama Islam tidak berhasil dibuat hanya saja yang pernah diterapkan adalah hukum Islam yang berasal dari kitab karang ulama. Akan tetapi yang berhasil dibuat dan diterapkan oleh kolonial Belanda ialah peraturan pemerintah kolonial Belanda terhadap Perkawinan bagi pemeluk agama Kristen yang diberlakukan khusus untuk warga negara Indonesia asli yang memeluk agama Kristen, juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang diberlakukan khusus untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan juga peraturan mengenai perkawinan campuran yang termaktub dalam Staatsblad 1898 No. 158 atau GHR.¹³⁷ Pemerintah kolonial Belanda juga meninggalkan hukum perkawinan bagi yang diperuntukan bagi warga negara yang beragama

¹³⁴ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981). Hal. 9-10.

¹³⁵ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). h. 77.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 85.

¹³⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 100.

Islam berbentuk hukum formal yang termaktub didalamnya mengenai tata cara perkawinan yang diintisarikan dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama Islam.

Pasang surut hukum perkawinan di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini, terkadang disambut dengan respon yang baik oleh pemerintah yang berkuasa kadang juga tidak direspon dengan baik, bahkan usulan-usulan yang diajukan mengenai hukum keluarga mendapat berbagai macam respon.¹³⁸ Hal tersebut juga terjadi pada kepemimpinan orde lama, yaitu masa kepemimpinan setelah kemerdekaan (1945-1965). Pada era orde lama ini, belum terkabulkan juga hajat untuk memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku secara menyeluruh. Yang masih berlaku ialah hukum perkawinan peninggalan kolonial Belanda yang berlaku terhadap masing-masing golongan:

- a. Bagi orang asli Indonesia berlaku hukum adat.
- b. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan yang bersumber dari ajaran Islam.
- c. Bagi orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen.
- d. Bagi warga negara yang berasal dari keturunan Cina dan Eropa berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- e. Dalam perkara perkawinan campuran berlaku Staatsblad 1898 No. 158 atau GHR.

Golongan masyarakat asli Indonesia yang beragama Islam masih sering menemukan permasalahan mengenai praktik hukum perkawinan yang berlaku bagi mereka berbeda dengan masyarakat Indonesia yang menganut agama Kristen dan masyarakat berdarah Eropa dan Cina yang jarang menemukan permasalahan dalam hal tersebut. Hal ini disebabkan karena yang beragama Islam tidak memiliki hukum perkawinan yang dikodifikasi

¹³⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010) h.133.

melainkan merujuk ada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang masih tersebar. Dengan adanya pemahaman yang beragam dalam memahami kitab fikih berujung pada perbedaan pemecahan persoalan dalam hukum perkawinan misalnya dalam batasan minimal usia perkawinan, talak, poligami dan lain-lain.

Perhatian akan hukum keluarga mulai muncul satu tahun setelah kemerdekaan yakni tahun 1946. Kemajuan hukum keluarga dimulai dari disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang tersebut berlaku hanya pada wilayah Jawa dan Madura, dan Sumatera yang diberlakukan sementara oleh Pemerintah Darurat RI.¹³⁹ Perhatian tersebut terus berlanjut di tahun berikutnya dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang berisikan hal yang berkaitan mengenai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Yang menjadi poin dalam instruksi tersebut antara lain pencegahan perkawinan usia dini, mendamaikan pasangan yang bermasalah menjelaskan akan kewajiban suami yang berpoligami, menjelaskan akibat hukum dari terjadinya perceraian, mengupayakan rujuk bagi pasangan yang bercerai.¹⁴⁰ Dan akhirnya pada tahun 1954 disahkannya undang-undang No. 32 tahun 1954 yang menyatakan undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴¹

Tidak puas atas hukum keluarga yang telah berlaku secara nasional, Front Wanita mendesak agar peraturan perkawinan ditinjau ulang dan agar disusunnya undang-undang perkawinan, peristiwa ini terjadi pada Agustus tahun 1950. Dengan adanya desakan tersebut terbitlah Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 1 Oktober 1950 yang menginstruksikan untuk

¹³⁹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). Hal. 96. Lihat pula dalam *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk*.

¹⁴⁰ Nani Soewondo. *Op.cit.*, h. 78-79.

¹⁴¹ Lihat dalam *Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura*.

dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk.¹⁴² Dikarenakan undang-undang ini akan diberlakukan secara nasional, untuk memenuhi kebutuhan tersebut anggota panitia ini terdiri dari ahli hukum Islam, hukum umum, hukum Kristen, dan berbagai aliran keagamaan dengan harapan nantinya undang-undang perkawinan yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kepanitian ini dipimpin oleh Teuku Hasan.¹⁴³

Tepatnya tanggal 1 Desember 1952 dirumuskannya rancangan undang-undang perkawinan yang di dalamnya terdapat peraturan khusus dan peraturan umum. Peraturan khusus maksudnya adalah yang mengatur semua golongan sedangkan yang dimaksud dengan peraturan khusus adalah yang mengatur golongan tertentu. Rancangan undang-undang ini disampaikan ke seluruh organisasi pusat dan lokal dengan harapan agar setiap organisasi berkontribusi memberikan pendapatnya mengenai hukum perkawinan yang nantinya akan dikodifikasi dan kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikiran ini berakhir pada tanggal 1 Februari 1953.¹⁴⁴ Rancangan ini selain bertujuan untuk dikodifikasi dan unifikasi juga bertujuan menata keadaan masyarakat dengan menetapkan beberapa hal, antara lain:

- a. Batas minimal usia perkawinan umur bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun, rancangan peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk pencegahan eksploitasi terhadap anak;
- b. Menyetarakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam hidup berrumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat tidak bersebrangan dengan aturan agama yang dianutnya dan dengan harapan dapat terwujudnya nilai-nilai keadilan;

¹⁴² Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008). h. 9.

¹⁴³ Nani Soewondo. *Op.cit.*, h. 176.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 177.

- d. Harta yang dibawa dan harta yang didapat setelah pernikahan berstatus sebagai harta bersama;
- e. Pengadilan Negeri berhak memutuskan perceraian, dengan alasan-alasan yang tertentu. Sedangkan hal yang berkaitan dengan talak dan rujuk dalam merujuk ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam;
- f. Status anak sah dan tidak sah, pengakuan atas anak, mengangkat anak dan mengesahkannya, hak serta kewajiban orang tua kepada anak, pencabutan kekuasaan orang tua atas anak dan perwalian.¹⁴⁵

Setelah menampung pendapat dari berbagai macam golongan kemudian dilaksanakannya rapat khusus oleh Panitia Nikah Talak dan Rujuk bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 24 April 1953. Kemudian pada bulan Mei 1953 Undang-undang Perkawinan disusun, yang dalam penyusunannya terdapat tiga sistem yang digunakan:

- a. Undang-Undang Pokok, yaitu hukum perkawinan yang tidak membahas agama dan merupakan peraturan yang berlaku bagi seluruh golongan (*uniform*).
- b. Undang-Undang Organik, yaitu hukum perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, dan agama Kristen Protestan;
- c. Undang-Undang golongan netral, yaitu hukum perkawinan yang tidak termasuk suatu golongan agama-agama.¹⁴⁶

Rancangan undang-undang berhasil dibuat satu tahun setelahnya yaitu tahun 1954. Rancangan undang-undang ini kemudian disampaikan Menteri Agama kepada Kabinet pada bulan September 1957 serta menjelaskan bahwa nantinya akan ada amandemen yang menyusul. Akan tetapi hingga memasuki

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 178-179.

¹⁴⁶ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Mestika, 1977). h. 180.

tahun 1958 belum terlihat adanya respon dari pemerintah yang berkenaan dengan undang-undang perkawinan.

Kebutuhan akan hukum perkawinan ini menjadi sebab terbitnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah Di Luar Pulau Jawa Dan Madura,. Dalam surat Edaran tersebut termaktub dalam huruf b anjuran untuk menggunakan 13 kitab rujukan masalah perkawinan yaitu: (1) *al-Bajuri*, (2) *Fath al-Mu'in*, (3) *Syarqowi ala al-Tahrir*, (4) *Qolyubi/Mahalli*, (5) *Fath al-Wahab dengan Syarahnya*, (6) *Tuhfah*, (7) *Targhib al-Musytaghfirin*, (8) *Qowanin Syar'iyah Li al-Sayyid bin Yahya*, (9) *Qowanin Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan*, (10) *Syamsuri fi al-Fara'idl*, (11) *Bughyah al-Musyarsyidin, al-Fiqhu Alaa Madzahib al-Arba'ah, Mughni al-Muhtaj*.¹⁴⁷

Tidak ada bentuk konkret perhatian dari pemerintah juga tidak adanya respon, yang akhirnya diajukanlah rancangan inisiatif oleh beberapa anggota wanita parlemen yang dikomandoi Soemari. Usul inisiatif itu menetapkan kehendaknyaaan menerapkan monogami. Tentunya berita tersebut menggemparkan bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia. Reaksi yang diberikan pemerintah pada waktu itu mengemukakan sebuah rancangan hukum perkawinan khusus yang dikhususkan bagi yang beragama Islam. Akan tetapi golongan Islam tradisional meragukan hal tersebut, dengan dalih bahwa tidak dibutuhkannya hukum perkawinan karena, Islam merupakan agama yang yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Rencana-rencana tersebut kemudian diabaikan dan tidak berlanjut untuk didiskusikan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum slam Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1993/1994, h.129-130. Lihat juga dalam: Amrullah Ahmad, *Dimendi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani ress, 2016), h.11

¹⁴⁸ J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alih Bahasa G.A. Ticoalu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). h. 19-20.

Rancangan Undang-Undang yang dirumuskan Soemari dicabut kembali oleh para pengajunya setelah enam bulan diajukan pengusulannya yakni pada bulan Oktober 1959. Rancangan tersebut tidak memiliki peluang untuk dibicarakan walaupun telah mendapatkan perhatian yang besar dari banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelawanan dilakukan oleh para anggota partai Islam terutama mengenai asasmonogami yang terdapat dalam rancangan tersebut. Berbeda halnya pejuang feminis yang sangat menentang adanya praktik poligami dalam rumah tangga.¹⁴⁹ Hal tersebut sebagai salah satu faktor internal yang menjadi sebab gagalnya rancangan undang-undang tersebut untuk diundangkan. Juga ada yang menjadi faktor eksternal yang yaitu terjadinya berubahnya system ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan akibat dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.¹⁵⁰

Hingga berakhirnya pemerintahan orde lama undang-undang perkawinan belum juga terbentuk. Akan tetapi keadaan ini tidak mematahkan semangat berbagai organisasi kemasyarakatan maupun dari pemerintahan untuk segera dibentuknya undang-undang perkawinan. Diantara organisasi yang antusiasnya sangat besar yaitu Musyawarah Nasional Untuk Pekerja Sosial, Kongres Wanita Indonesia, Konferensi BP4 Pusat, dan Musyawarah Kesejahteraan Keluarga.¹⁵¹

Upaya pembentukan undang-undang perkawinan terus dilakukan hingga memasuki priode orde baru. DPR-GR mengajukan dua undang-undang perkawinan yang pertama bersumber dari Departemen Agama yaitu RUU Perkawinan Umat Islam yang kedua berasal dari Departemen Kehakiman yaitu RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan. Pengajuan ini dilakukan pada bulan Mei tahun 1967 dan bulan September 1968 dalam masa persidangan 1967-1971 yang dilaksanakan oleh Parlemen (DPR-GR).¹⁵²

¹⁴⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002). h. 196-197

¹⁵⁰ T.Jafizham, *Op.cit.*, h. 98

¹⁵¹ Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Op.cit.*, h. 9

¹⁵² Nani Soewondo. *Op.cit.*, h. 103

Yang menjadi hambatan dalam pembahasan RUU perkawinan adalah karena adanya penolakan dari Fraksi Katolik untuk membahas RUU yang diambil dari tuntunan agama.¹⁵³ Fraksi Katolik mengutarakan ide dan gagasannya terhadap RUU Perkawinan yang dituangkan dalam surat kabar *Operasi* yang terbit pada edisi 14-18 April 1969.¹⁵⁴ Fraksi Katolik mengatakan bahwa tata cara pengaturan perkawinan seperti yang tertuang dalam kedua rancangan undang-undang perkawinan tidak selaras dengan hakekat Negara Pancasila, yang kemudian diartikan adanya perubahan dasar negara yang sebelumnya berdasarkan pancasila menjadi berdasarkan agamayang sesuai dengan perinsip yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Pernyataan Fraksi Katolik tersebut dibalas oleh Kepala PUSROH Islam POLRI yaitu Hasbullah Bakry. Ia mengatakan partai Katolik tidak berhasil dalam mewujudkan misi politiknya apabila undang-undang tersebut berhasil disahkan. Karena sebulum lahirnya pancasila sebagai dasar negara dan Indonesia dnyatakan sebagai negara pancasila telah ada lebih dulu undang-undang yang mengatur perkawinan yang diambil dari hukum-hukum agama. Hal ini tidak berarti adanya perubahan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila menjadi sebuah negara yang berdasarkan agama. Karena tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan ini adalah demi terwujudnya keadilan sosial bangsa Indonesia yang didalamnya terdiri dari kaum Ibu yang mayoritas beragama Islam.¹⁵⁵

Pengajuan RUU Perkawinan kembali dilakukan pada bulan Juli 1973. Pengajuan ulang ini dilakukan oleh Departemen Kehakiman kepada DPR hasil pemilu 1971. RUU Pekawinan ini berisi 15 bab dan 73 Pasal. Kemudian

¹⁵³ Deliar Noor, *Administrasi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983). h. 98. meskipun wakil golongan katolik sangat kecil jumlahnya hanya 8 anggota dari 500 anggota, mereka menjadi sebab kemacetan pembahasan kedua RUU tersebut. Sebab menurut tata tertib Parlemen ketika itu tiap keputusan hendaknya mufakat.

¹⁵⁴ H.M Rasjadi, *Kasus RUU Perkawinan Dalam Hubungan Islam Dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 34

¹⁵⁵ Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). h. 122.

dengan amanat Presiden Soeharto kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR tahun 1967 tersebut ditarik kembali.¹⁵⁶

Tidak hanya partai Katolik yang sempat menentang RUU perkawinan. RUU perkawinan juga ditentang dari kalangan Islam. Anggapan akan RUU perkawinan bertentangan dengan agama dan juga bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945 juga datang dari berbagai tokoh dan organisasi Islam. Satu-satunya fraksi yang menentang RUU perkawinan karena bertentangan dengan ajaran Islam adalah fraksi PPP, hal tersebut dihitung berdasarkan komposisi kekuatan fraksi-fraksi yang ada pada DPR. Berita tersebut sudah dapat diketahui walaupun pemerintah dan DPR belum membasnya secara internal.¹⁵⁷

Penolakan akan RUU perkawinan dilakukan oleh berbagai macam komunitas ada yang berasal dari ulama, masyarakat bahkan dari pemerintah sendiri. Yang menjadi perhatian adalah penolakan yang dilakukan oleh pimpinan fraksi PPP yaitu KH. Yusuf Hasyim. Yang dalam pandangannya terjadi banyak kekeliruan pada RUU perkawinan dan adanya pertentangan dengan Pancasila maupun unsur-unsur keagamaan.¹⁵⁸

Adanya penolakan dari KH. Yusuf Hasyim berdasarkan amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 tentang penarikan draf RUU Perkawinan dari DPR dengan tujuan agar tatap meninjau kembali ke arah yang lebih maslahat. Penolakan juga dilakukan oleh Abdul Malik Karim Abdullah yang dikenal dengan nama pena Hamka. Ia menilai RUU perkawinan bertolak belakang dengan hukum Islam. Hamka berpendapat yang menjadi tujuan pensyariaan atau *tasyriul Islamiy* adalah dalam lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

¹⁵⁶ "Amanat Presiden No. R.02/P.U/Vii/1973 Tanggal 31 Juli 1973 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan.,"

¹⁵⁷ Amak FZ., *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976). h. 7.

¹⁵⁸ "Suara Sugiarto Paralel Dengan Doktrin Komunis RUU Perkawinan Bertentangan Dengan UUD 1945," Surat Kabar Harian Abadi. Jakarta, 20 Agustus 1973.

Diantara persoalan yang dipertentangkan dalam RUU perkawinan adalah mengenai kebolehan menikahi saudara sesusuan, dan di dalam RUU perkawinan itu juga menyarakan bahwa anak hasil hubungan diluar perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, sedangkan dalam Islam anak tersebut berstatus sebagai anak hasil zina. Poin inilah yang menjadi perhatian khusus tokoh Islam dalam mengkritisi RUU perkawinan yang dipandang tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam memelihara keturunan.¹⁵⁹

Penolakan RUU perkawinan juga datang dari perguruan tinggi Islam, penolakan ini merupakan hasil dari penelitian para akademisi kampus terhadap RUU perkawinan yang dalam penelitiannya tercatat ada sebanyak 14 Pasal yang tidak sejalan dengan hukum Islam, yang didalamnya membahas tentang:¹⁶⁰

- a. Definisi perkawinan
- b. Peluang poligami dan poliandri
- c. Batasan poligami yang tidak tegas
- d. Izin suami yang akan melakukan poligami
- e. Batas waktu istri pergi tanpa ada kabar
- f. Persoalan wali
- g. Larangan perkawinan yang disebabkan karena pengangkatan anak,
- h. Permasalahan perkawinan beda agama,
- i. Masa tunggu (*iddah*)
- j. Persoalan arangan rujuk bagi bagi suami yang telah mentalak istriya
- k. Permasalahan tunangan dan putusnya perkawinan.

Berdasarkan 73 Pasal yang terdapat dalam RUU perkawinan terdapat beberapa Pasal yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat serta dinilai bertentangan dengan hukum Islam antara lain Pasal 2 Ayat 1 RUU

tt. ¹⁵⁹ Hamka. "RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan." Artikel. Media Dakwah, Jakarta.

¹⁶⁰ Suara Institut." Harian Kami. Jakarta, 28 Agustus 1973 .

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian oleh pegawai yang bewenang dicatat dalam daftar pencatat perkawinan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang juga menurut ketentuan yang termaktub dalam hukum perkawinan, serta tidak adanya hal yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan.

Para tokoh ulama yang menentang berpandangan bahwa adanya pencatatan pernikahan merupakan kebutuhan administratif belaka dan tidak dapat dijadikan ukuran atas sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Karena menurut mereka pernikahan sah apabila seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, tanpa hendaknya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pada Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) RUU Perkawinan yang menyatakan status hubungan perdata anak diluar perkawinan haya dengan ibunya saja akan tetapi ayahnya dapat mengakuinya sebagai anak dan dapat mensahkan hubungan nasab dan hubungan perdata melalui sebuah perkawinan.¹⁶¹ Inisiatif KH. M. Bisri Sjansuri juga mengusulkan perubahan RUU Perkawinan disampaikan dalam forum musyawarah ulama di Denanyar Jombang pada 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973.

RUU Perkawinan yang dianggap bersebrangan dengan hukum Islam, apabila dipaksakan untuk diterapkan maka akan sulit berjalan dan beresiko untuk sulit diberlakukan secara efektif. Hal ini terjadi dikarenakan bagi umat Islam melakukan suatu hal yang bersebrangan dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan.¹⁶² Juga dalam prespektif ketatanegaraan apabila undang-undang dinilai sebagai hal yang bertentangan dengan Islam termasuk dalam pengingkaran akan jaminan bagi bangsa

¹⁶¹ Draf RUU Perkawinan versi Pemerintah, Tahun 1973.

¹⁶² Jika RUU Perkawinan 1973 tetap dipaksakan juga menjadi undang-undang, maka para ulama akan mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang melangsungkan perkawinannya menurut undang-undang itu dan hanya wajib melangsungkan perkawinan secara Islam . Lihat: Amak FZ, *Op.Cit.* h. 7.

Indonesia dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pada Pasal 29.

Presiden Soeharto juga memberikan perhatiannya kepada pemikiran kelompok yang mementang RUU Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari sambutan yang diberikan Presiden Soeharto kepada KH. Bisri Syamsuri (Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan/F-PP) dan KH. Masykur (Ketua F-PP). Lobi melobi kemudian dilakukan oleh penguasa tingkat tinggi dengan Fraksi Persatuan Pembangunan bersama dengan Fraksi ABRI sebagai bentuk realisasi dari pertemuan antara delegasi F-PP tersebut dengan Presiden Soeharto. Yang kemudian menghasilkan konsensus antar kedua fraksi tersebut.¹⁶³ Yang berimbas pada perubahan RUU sesuai poin-poin yang telah disepakati pada konsensus tersebut. Isi dari konsensus tersebut adalah:

- a. Hukum Islam yang termaktub dalam RUU tersebut tidak dapat dikurangi, dengan kosekuensi tidak berubahnya pula peraturan pelaksanaannya.
- b. Menghapus segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan RUU.

Kelompok Nasrani ternyata tidak menyukai konsensus tersebut, mereka berpandangan bahwa hukum agama dan negara tidak dapat disatupadukan. Dalam artian Kelompok Nasrani tidak setuju akan transformasi norma agama menjadi sebuah undang-undang. Faham sekuler ini sesuai dengan doktrin gereja yang berpandangan bahwa hendaknya dipisahkannya antara urusan beragama dan bernegara. Urusan yang berkaitan dengan negara diatur oleh hukum Negara sedangkan urusan yang berkaitan dengan agama diatur oleh hukum agama.¹⁶⁴

Perdebatan mengenai RUU Perkawinan menjadi topik hangat bagi semua kalangan pada waktu itu. Pembahasan mengenai RUU perkawinan pada tahun

¹⁶³ Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Op.Cit.*, h. 28

¹⁶⁴ Mohammad Daud Ali, "*Perkawinan Campuaran*" dalam majalah Panji Masyarakat, No.709, 1-10 Februari 1992, hal. 20.

1973 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib yang ada, pelaksanaannya melalui empat tahap. *Pertama*, pemerintah menjelaskan RUU tersebut. *Kedua*, respon dari masing-masing Fraksi terhadap RUU Perkawinan tersebut disertai dengan tanggapan Pemerintah atas pandangan umum itu. *Ketiga*, pelaksanaan rapat Komisi (Komisi III dan Komisi IX) yang membahas RUU Perkawinan tersebut yang diserahkan kepada panitia kerja RUU perkawinan. *Kempat*, pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari masing-masing Fraksi.¹⁶⁵

Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1973 RUU perkawinan tersebut memasuki tahap keempat yaitu dengan membahasnya pada Sidang Paripurna DPR-RI. Tahap keempat ini dilakukan setelah RUU mengalami perubahan-perubahan pada tahap-tahap sebelumnya. Sebagaimana yang telah diaparkan sebelumnya, bahwa isi dari tahapan terakhir ini adalah pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari masing-masing Fraksi. Tepatnya pada hari itu RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah dibahas selama tiga bulan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 tercatat sebagai hari berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.

Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Harapan terpenuhinya kebutuhan akan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 belum tercapai. Pada kenyataannya penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya masih banyak

¹⁶⁵ Ada empat Fraksi dalam DPR yaitu : 1) fraksi Karya Pembangunan (FKP), 2). Fraksi ABRI, 3) fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), dan 4). Fraksi Demokrasi Pembangunan (FDP). Fraksi-fraksi ini merupakan salah satu alat kelengkapan dalam tubuh DPR, yang dipandang mencerminkan konstelasi pengelompokan pemikiran dalam masyarakat.

kebutuhan hukum yang belum terpenuhi.¹⁶⁶ Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang isinya tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.¹⁶⁷

3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Terwujudnya penyatuan (*unification*) Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah untuk membangun hukum keluarga di Indonesia. Langkah ini hendaknya ditempuh meskipun dalam catatan sejarah selalu ada pro dan kontra dalam proses pembentukannya.¹⁶⁸

Terwujudnya Undang-Undang Perkawinan merupakan tanda bahwa memang benar Indonesia memerlukan hukum perkawinan yang sifatnya unikatif dengan harapan kedepannya dapat menangani konflik sistem hukum perkawinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu yang menjadi landasan disatukannya hukum perkawinan adalah tren tentang modernisasi hukum di kalangan elite pemerintah, jargon Bhinneka Tunggal Ika dengan satu tujuan yaitu ketahanan nasional yang diperkokoh dengan pembangunan hukum dan kepastian hukum.¹⁶⁹

Batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Batas minimal usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan

¹⁶⁶ Lihat: " Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

¹⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum Materiil di Pengadilan Agama, lihat: "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam,"

¹⁶⁸ Yang menjadi korban utama dalam unifikasi hukum perkawinan ini adalah hukum adat yang dinilai tidak sejalan dengan modernisasi hukum dan dinilai sebagai huku kuno dan primitif. Lihat: Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 232.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h.231

Tahun 1973.¹⁷⁰ Pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan akhirnya ditunda, dikarenakan dalam hal ini menuai potensi perdebatan dan rawan konflik.¹⁷¹

Setelah melalui tahapan-tahapan pembentukan undang-undang pada akhirnya isi kandungan Pasal 7 Ayat (1) menurunkan batasan minimal usia perkawinan yang pada sebelumnya 21 tahun untuk laki-laki menjadi 18 tahun, dan 18 tahun untuk perempuan menjadi 16 tahun. Dan apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pejabat yang berwenang.¹⁷² Dapat diketahui bahwa batasan usia perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan apa yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 1973.

Terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bukan berarti telah selesainya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Ditambah dampak negatif adanya pernikahan dini yang muncul dikalangan masyarakat menyebabkan timbulnya kritik atas batasan usia perkawinan di Indonesia. Diskursus dan kritik terhadap batasan minimal usia perkawinan terus berkembang, dan mulai menguat pada tahun 2003. Perkembangan diskursus ini terjadi di berbagai kalangan antara lain reformis, tradisional, terlebih lagi di kalangan aktivis HAM, gender, dan perlindungan anak. Pasang surut issue mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengikuti

¹⁷⁰ 29 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

¹⁷¹ Ratno Lukito, *Op.Cit.*, h. 260.

¹⁷² 32 Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

issue tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan.¹⁷³

Ratno Lukito mengemukakan setidaknya ada tiga penyebab timbulnya pro dan kontra terhadap batas minimal usia menikah. Pertama, kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selesai antara umat Islam dan negara. Kedua, keyakinan kebenaran akan pemahaman fikih dan budaya yang sulit dilepaskan dari masyarakat. Ketiga, masih melekatnya relasi gender tradisional di masyarakat. Dan dapat disimpulkan adanya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan merupakan berdebatan paradigma hukum Islam dan hukum negara.¹⁷⁴

Tidak hanya sebatas diskursus dan kritik saja, akan tetapi hingga upaya merubah Undang-Undang Perkawinan dilakukan. LBH APIK¹⁷⁵ salah satunya yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Perkawinan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM dan terkesan melegalkan pernikahan dini pada tahun 2003. Satu tahun setelahnya Musdah Mulia yang merupakan ketua dari Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)¹⁷⁶ juga mewakili kelompok akademisi dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak dapat mengakomodir hukum Islam yang bersifat humanis, juga tidak sejalan dengan Undang-Undang lain yang ada di Indonesia maupun pada tingkat internasional. Kemudian Musdah Mulia berserta anggota

¹⁷³ Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36

¹⁷⁴ Ratno Lukito, *Op.Cit*, h. 269-270. Tren di beberapa negara juga memberikan memberikan pengaruh yang cukup besar pada masalah batas minimal usia perkawinan. Lihat : Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), h. 61.

¹⁷⁵ LBH APIK Jakarta didirikan oleh tujuh orang pengacara perempuan tanggal 4 Agustus 1995. Mulai 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta telah resmi berubah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta dengan Akte Notaris bernama Rusnaldy No. 112/2003. Lihat : <http://www.lbhapik.or.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2020

¹⁷⁶ Terdapat sebuah lembaga yang didirikan oleh Departemen Agama yang diberi nama Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) yang berdiri pada tanggal 19 September 2002. Di dalam lembaga tersebut terdapat Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang dipimpin oleh Musdah Mulia dan beberapa anggota lainnya yaitu: Marzuki Wahid, Abdul Moqsi Ghazali, Abdurrahman Bima, Saleh Partaonan, Anik Farida, dan Ahmad Mubarrak.

Pokja PUG lainnya mengusulkan lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004 yang kemudian menimbulkan perdebatan baru karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷⁷

Pada tahun 2010 upaya untuk merubah ketentuan batas minimal usia perkawinan kembali dilakukan oleh berbagai kelompok diantaranya Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kementrian Agama membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan)¹⁷⁸ yang kemudian dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010-2014.¹⁷⁹ Di tahun yang sama BKKBN menerbitkan buku dengan judul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia”. Dengan gagasan pendewasaan usia perkawinan (PUP) BKKBN berupaya untuk menaikkan basa minimal usia perkawinan menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan.¹⁸⁰

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kembali dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya oleh Lembaga Swadaya

¹⁷⁷ Syahrul Musthofa, *Op.Cit.*, h.37

¹⁷⁸ Adanya inkoherenasi pada materi RUU MHPA menyebabkan redupnya RUU MHPA pada Prolegnas 2010-2014. Yang merupakan pokok materi dari RUU HMPA adalah peningkatan batas minimal usia perkawinan menjadi 21 tahun laki-laki dan 18 tahun perempuan. Materi RUU HMPA huruf (c) berbunyi “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity) Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini hendaknya dengan dispensasi Pengadilan” bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.”

¹⁷⁹ Yulianti Muthmainnah, “Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” Majalah Swara Rahima, Ed.36, Juni 2010.

¹⁸⁰ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), h. 9

Masyarakat (LSM) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak yang menilai bahwa batasan minimal usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka menilai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia bukan hanya berdampak buruk terhadap kesehatan anak tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas negara.¹⁸¹ Akan tetapi usaha ini ditolak oleh MKRI pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No. 30-74/PUU-XII/2014.

Pada tanggal 20 April 2017 upaya *Judicial Review* kembali dilakukan oleh tiga orang pemohon. Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Dengan pengalaman pribadinya yang dinikahkan pada usia 14 tahun dengan laki-laki berstatus duda yang berusia 37 tahun, ekonomi keluarga merupakan alasan terjadinya perkawinan tersebut. Banyaknya dampak negatif yang didapatkan setelah melaksanakan perkawinan tersebut menjadi argumen pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dampak negatif yang diterima oleh pemohon I yaitu putus sekolah saat menjalani pendidikan tingkat SMP kelas 2, keadaan ekonomi yang tetap buruk karena tingkat pendidikan yang rendah, setelah melangsungkan perkawinan usia dini pemohon I menderita infeksi organ reproduksi.¹⁸²

Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Ekonomi keluarga juga yang menjadi alasan pemohon II, selain itu orang tua pemohon II mempunyai hutang kepada calon suaminya. Dampak negatif dari perkawinan tersebut pemohon II tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya, juga pemohon II kerap mengalami keguguran.¹⁸³

Pemohon III juga merupakan perorangan warga negara Indonesia yang pada usia 13 tahun dinikahkan dengan laki-laki berusia 25 tahun. Kondisi

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 40

¹⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017

¹⁸³ *Ibid.*,

ekonomi keluarga menjadi alasan perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut berlangsung setelah tamat sekolah dasar, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi ijazah sekolah pemohon III tidak dapat diambil. Pada usia 14 tahun pemohon III melahirkan anak pertamanya. Pemohon III sepanjang hidupnya melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali dalam usia anak dengan alasan ekonomi.¹⁸⁴

Pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 belum menetapkan batas usia perkawinan pada putusannya. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinilai diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁸⁵

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Melalui pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018, menjadi dasar perubahan batas usia perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 September 2019 mengetuk palu disahkannya RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Presiden Joko Widodo sebagai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .¹⁸⁶ Isi dari Pasal 7 dirubah menjadi Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

¹⁸⁴ *Ibid.*,

¹⁸⁵ *Ibid.*,

¹⁸⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun> diakses pada tanggal 10 Februari 2020

(sembilan belas) tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak diundangkan Plt. Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober.

B. Hukum Keluarga di Malaysia

1. Potret Negara Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari 13 (tigabelas) negara bagian yaitu Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Malaka, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Sabah, Trengganu, dan Serawak. Serta terdiri dari beberapa wilayah persekutuan¹⁸⁷ yaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.

Portugis dan Belanda pernah menguasai Malaysia sebelum Inggris masuk untuk menjajah pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1824 Inggris dan Belanda menandatangani traktat yang menyatakan kekuasaan Inggris di wilayah Malaysia dan Singapura. Traktat ini ditandatangani di London. Inggris dan Belanda merupakan penerus wilayah-wilayah jajahan Portugis dan Belanda yang dulunya diberi nama *Straits Settlement* yaitu wilayah Penang, Singapura dan Malaka, *Federated Malay States* yaitu wilayah Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan *Unfederated Malay States* yaitu wilayah Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, dan Johor, Borneo Inggris yaitu wilayah Sabah dan Serawak yang kemudian bergabung dalam Negara Malaysia.¹⁸⁸

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Federasi Malaysia merdeka dari jajahan Inggris. Tercatat pada tahun 2004 persentase penduduk muslim

¹⁸⁷Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persekutuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004) h.156

¹⁸⁸ *Ibid*, h.156

Malaysia adalah 60 % dari seluruh jumlah penduduk Malaysia dengan paham agama mazhab Syafi'i walaupun ada dari sebagian kecil penduduk muslimnya berpemahaman agama mazhab Hanafi. 40% penduduk lainnya beragama Kristen, Budha, dan Hindu. Terdapat dalam konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa "Islam adalah agama Federasi", tetapi agama-agama lain diterima dan diperkenankan (bagian 1 Pasal 3). Dalam konstitusi Malaysia juga termaktub bahwa Kepala Negara bagian adalah kepala agama Islam. Juga dalam Pasal 11 tertulis bahwa Malaysia menerima prinsip kebebasan beragama.¹⁸⁹

John L. Esposito mengatakan bahwa yang menarik dari konstitusi Malaysia adalah didalam konstitusi Malaysia diabadikannya identifikasi menurut agama dan etnik dengan kedudukan yang istimewa bagi agama Islam, Sultan, dan pemeluk agama Islam.¹⁹⁰ Ia berpendapat bahwa yang didefinisikan sebagai orang melayu adalah penduduk yang beragama Islam, berbahasa melayu, dan beradat melayu. dan juga terdapat hak-hak istimewa bagi orang melayu dalam ranah pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis.

2. Kodifikasi Hukum Keluarga di Malaysia

Pada mulanya sebelum Inggris menjajah Malaysia, hukum yang berlaku ialah hukum Islam dan hukum adat.¹⁹¹ Hukum adat yang berlaku adalah adat pepatuh yang dianut oleh mayoritas orang melayu di Negara Sembilan dan di beberapa kawasan Malaka, juga adat Temenggun yang dianut di wilayah semenanjung. Akan tetapi pada wilayah Serawak diberlakukan Undang-Undang Mahkamah Melayu Serawak dimana undang-undang tersebut sangat kental dengan hukum Islam terutama dalam hal jual beli, perkawinan, dan perceraian.¹⁹²

¹⁸⁹ *Ibid*, h.157.

¹⁹⁰ John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1999), h.167

¹⁹¹ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta : INIS, 2002), h. 62

¹⁹² Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995) h.8

Kemudian setelah Inggris masuk menjajah tepatnya pada tahun 1880 Inggris mengesahkan *Muhammedan Marriage Ordinance* No.V Tahun 1880 sebagai hukum perkawinan dan perceraian Islam yang berlaku di negara-negara bagian selat yaitu Malaka, Pulau Pinang, dan Singapura. *Muhammedan Marriage Ordinance* No.V Tahun 1880 terdiri dari IV (empat) bab. Bab I berisi peraturan mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian yang terdiri dari Pasal 1 sampai Pasal 23. Bab II berisi tentang tata cara pelantikan kadi yang terdiri dari Pasal 24 sampai 26. Bab III berisi tentang peraturan harta benda dalam perkawinan yang tertulis dalam Pasal 27. Dan bab IV yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan umum terdiri dari Pasal 28 sampai 33.¹⁹³

Sedangkan di Negara-negara Melayu bersuku yaitu Pahang, Negerisembilan, Selangor, dan Perak yang berlaku sebagai hukum perkawinan adalah *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885*. Dan bagi Negara-negara bernaung (Negara-negara Melayu tidak bersekutu) yaitu Johor, Kedah, Perils, Terengganu, dan Klantan yang berlaku sebagai hukum keluarga adalah *The Divorce Regulation* tahun 1907.¹⁹⁴

Malaysia sebagai Negara Federal memberikan kewenangan legislasi hukum keluarga Islam kepada masing-masing negara bagian dan pemberlakuannyapun dalam wilayah negara bagian masing-masing. Kecenderungan untuk mengadopsi hukum keluarga dari kitab-kitab fikih belum dapat dilepaskan dalam legislasi hukum keluarga Islam di Malaysia. Kecenderungan ini didominasi oleh pemahaman fikih mazhab Syafi'i yang dianggap sesuai dengan konteks ke-Malaysia-an. Dalam pembentukan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negeri Selangor lah yang memprakasainya kemudian diikuti oleh negeri-negeri lainnya. Pembentukan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negeri dimaksudkan sebagai

¹⁹³ Khoirudin Nasution, Op. Cit., h.62-66

¹⁹⁴ *Ibid.*, h.20

pedoman normatif mengenai masalah keluarga yang berdasarkan hukum Islam disamping fungsinya sebagai hukum administrasi bagi yang beragama Islam.¹⁹⁵ Posisi hukum keluarga Islam pada priode ini sangatlah minim karena termasuk dalam bagian dari Enakmen Administrasi Agama Islam.¹⁹⁶

Terjadinya ketidaksesuaian hukum antar Wilayah Persekutuan Malaysia disebabkan karena beragamannya hukum keluarga Islam yang terdapat pada Enakmen Pentadbiran Agama Islam di berbagai wilayah. Keadaan tersebut melatarbelakangi semangat reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia yang di mulai pada tahun 1980. Pemerintahan Federal Malaysia membentuk jawatan kuasa¹⁹⁷ yang bertugas menyusun Rancangan Undang-Undang Keluarga Islam untuk diterapkan di seluruh negeri.¹⁹⁸ Majlis Raja-raja telah menyetujui draf ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan draf ini adalah *takhayyur* dan *talfiq*. Tujuan utama penyusunan draf ini adalah sebagai langkah reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia disamping itu pula sebagai upaya pemisahan anantara Enakmen Pentadbiran dan hukum keluarga Islam. Walaupun pendapat dari mazhab Syafi'i yang mendominasi dari susunan draf hukum keluarga Islam akan tetapi mazhab-mazhab lain juga menjadi pertimbangan pembentukan hukum keluarga Islam.

Dalam upaya menyelidiki draf tersebut dibentuk juga Jawatankuasa di wilayah-wilayah persekutuan. Paham hukum agama yang berbeda menjadi salah satu faktor tidak teralisasikannya keinginan untuk menyatukan hukum

¹⁹⁵ Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: Malayan Lau Journal Sdh Bhd, 1999) h.6-7. Lihat juga : Raihanah Hj. Azhari, " Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Suatu Realiti," dalam *Jurnal Fiqh* No. 4 (2007), h. 253-254

¹⁹⁶ Kritik juga disampaikan oleh Ahmad Ibrahim dalam upaya mereformasi hukum keluarga Islam. Lihat : Raihanah Abdullah, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia : Satu Sorotan Literatur dalam Mahkamah Syariah di Malaysia : Pencapaian dan Cabaran*, (Kuala Lumpur :University Malaya, 2005) h. 127-129

¹⁹⁷ Dalam kamus bahasa melayu Jawatankuasa berarti sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan atau mengurus tugas-tugas tertentu, panitia. Diakses dari : <http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=jawatankuasa> pada tanggal 11 Februari 2020

¹⁹⁸ Ahmad Ibrahim mengatakan upaya unifikasi hukum keluarga mulai dirintis pada bulan Agustus 1978 oleh NCIA (*The Nation Council of Islamic Affair*) Lihat : Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam d Malaysia*, terj. Hendro Prasetyo (Bandung : Mizan, 1993), h. 104-105

keluarga tersebut dan pada akhirnya cita-cita tersebut tidak tercapai. Dibentuk pula Jawatankuasa di Kuala Lumpur yang terdiri dari Hakim Ketua, Mufti, akademisi University of Malaya, pejabat Departemen Agama, dan perwakilan dari perempuan UMNO. Hasil dari perkumpulan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303.¹⁹⁹

Pada akhirnya yang menjadi percontohan sebagai Enakmen Hukum Keluarga Islam ialah Akta No.303 tentang Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984. Di dalam akta tersebut mengatur mengenai permasalahan perkawinan, nafkah, perceraian, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303²⁰⁰ terdiri dari 10 bagian:

- a. Bagian I Pembukaan (seksyen 1-6)
- b. Bagian II Perkawinan (seksyen 7-24)
- c. Bagian III Pendaftaran Perkawinan (seksyen 25-34)
- d. Bagian IV Ketentuan Dan Ketentuan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Solemnisasi dan Pendaftaran Perkawinan (seksyen 35-44)
- e. Bagian V Pembubaran Perkawinan (seksyen 45-58)
- f. Bagian VI Pemeliharaan Istri, Anak-Anak Dan Orang Lain (seksyen 59-80)
- g. Bagian VII Perwalian mencakup Hadhanah atau Pengasuhan Anak, Perlindungan Anak dan Harta (seksyen 81-107)
- h. Bagian VIII Legitimasi Perkawinan, Banding, Perkawinan di Luar Negeri (seksyen 81-107)
- i. Bagian IX Hukuman (seksyen 123-133)
- j. Bagian X Ketentuan Umum (seksyen 134-135)

¹⁹⁹ Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 disahkan Diraja (*Royal Assent*) pada tanggal 27 Juni 1984 dan diterbitkan dalam Warta (*Gazette*) pada tanggal 28 Juni 1984. akta ini mulai diberlakukan tanggal 29 April 1987.

²⁰⁰ <http://www2.esyariah.gov.my/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2020

Selain Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303 yang dijadikan percontohan. Negeri Kelantan (1983) dan Kedah (1984) juga menerbitkan Undang-Undang Keluarga Islam. Kemudian negeri-negeri lainnya seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Sarawak, Perlis, Perak, Sabah, Terengganu, dan Selangor mengambil ketiga Enakment Undang-Undang Keluarga Islam tersebut sebagai percontohan.²⁰¹

Dampak positif dari dikodifikasikannya Enakmen Keluarga Islam di Malaysia adalah adanya kepastian hukum terlebih bagi perempuan yang bersangkutan dengan hak-hak perempuan. Karena pada masa sebelumnya yaitu ketika hukum keluarga masih tergabung dalam Undang-Undang Administrasi masih banyak ketentuan hukum yang tidak jelas yang berakibat penafsirannya dikembalikan kepada pendapat ulama fikih yang berujung pada ketidakpastian hukum karena sifatnya yang sangat beragam.²⁰² Bahkan, karena dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progresif Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303 diapresiasi secara internasional.²⁰³

Perbedaan yang mendasar dari Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303 dengan Undang-Undang Negeri Kelantan (1983) dan Kedah (1984) adalah mengenai wali nikah. Pada Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta No.303 menghendaknyakan adanya izin dari calon isteri dan wali untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Negeri Kelantan (1983) dan Kedah (1984) masih megadopsi fikih konvensional mazhab Syafi'i dengan sistem *wali mujbir* dengan memberi hak penuh kepada *wali mujbir* untuk melangsungkan perkawinan bagi calon isteri yang masih di bawah umur. Tentunya hal ini mendapat teguran keras dari berbagai kalangan

²⁰¹ Abdul Munir Yaacob, *Pengkanunan Undang-Undang di Malaysia : Pelaksanaan Hukum Syarak di Malaysia*, (Johor Baru: Pejabat Mentri Besar Johor, tt), h. 69 Lihat juga : Abdul Monir Yaacob, "Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia", dalam *Jurnal Fiqh*, No.6, 2009, h. 6-7

²⁰² Mehrun Siraj, "Woman and The Law : Significant Developments in Malaysia", dalam *Law and Society Review*, Vol, No. 3, 1994

²⁰³ Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, "Justice and Equality in Muslim Family Laws, Possibilities and Strategies for Reform ." dalam *Washington and Lee Law Review*, Vol.64, No.4, 2007, h. 1533

aktivis *gender* dan dari kalangan akademisi karena dinilai sebagai ketentuan hukum yang bersifat diskriminatif.²⁰⁴

Upaya unifikasi hukum keluarga Islam di Malaysia tidak berhenti disitu. Pada tahun 1988 dibentuklah Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil yang dipimpin oleh Ahmad Ibrahim. Tujuan dibentuknya Jawatan Kuasa ini adalah untuk mengkaji ulang undang-undang yang telah ada kemudian disesuaikan kembali dengan hukum Islam juga dalam rangka perutusan ulang draf Undang-Undang yang nantinya dapat digunakan oleh Mahkamah. Hasil dari Jawatan kuasa ini adalah menselaraskan bagian yang terkandung dalam Undang-Undang Keluarga Islam di berbagai negeri. Walaupun upaya unifikasi hukum keluarga Islam di Malaysia tidak berhasil dilakukan akan tetapi secara substansial terjadi keselarasan aturan hukum Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di berbagai negeri.²⁰⁵

Proses rekonstruksi hukum keluarga Islam di Malaysia berlanjut pada dekade 1990-an. Pada tahun 1990-an lahir berbagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dan amandemennya, yaitu :

- a. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 1990
- b. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah Tahun 1992
- c. Amandemen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta A828 Tahun 1992
- d. Amandemen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta A902 Tahun 1994

Hasil dari amandemen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta A902 Tahun 1994 adalah :

- a. Dihapusnya seksyen 24 Nomor 4 butir (e) rentang poligami

²⁰⁴ Zanariah Noor, "gender Justice dan Islamic Family Law in Malaysia", dalam *Kajian Malaysia*, Vol.25 No.2, Desember 2017, h. 141-142

²⁰⁵ Abdul Munir Yaacob, *Op.Cit.*, h. 69-7. Lihat juga : Ahmad Mohamed Ibrahim, *Recent Developments in the Administration of Islamic Law in Malaysia*, (London : Kluwer Law International, 1997) h. 122

- b. Ditambahnya seksyen 55A yang mengesahkan talak yang diucapkan di luar pengadilan

Pasca amandemen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta A902 Tahun 1994 lembaga swadaya masyarakat *Sisters in Islam* (SIS) mengajukan memorandum ke Pemerintah Malaysia. Memorandum tersebut diajukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Desember 1996 dan Maret 1997. Pengajuan memorandum tersebut disebabkan karena SIS menilai bahwa banyaknya unsur diskriminatif terhadap perempuan tentang talak, poligami, nafkah iddah, dan nusyuz.²⁰⁶

Proses pembaruan hukum keluarga Malaysia berlanjut di tahun 2000-an. Setelah diadakannya pertemuan Majelis Raja-Raja ke-176 yaitu pada tanggal 1 Agustus 1997, dan pertemuan ke-188 yaitu pada tanggal 22 Maret 2001 mengeluarkan kesepakatan untuk dilakukannya penyeragaman Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.²⁰⁷ Yang menjadi rujukan perubahan dan penyeragaman substansi undang-undang di berbagai negeri adalah Undang-Undang Keluarga Islam yang dibuat oleh Persekutuan.²⁰⁸

Hingga masuk tahun 2005 upaya unifikasi Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia hampir selesai. Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia pada saat itu menyatakan bahwa upaya unifikasi Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia didasarkan atas upaya perlindungan hak-hak perempuan tingkat nasional, seperti dalam hal harta bersama, dan poligami.²⁰⁹ Setelah mengesahkan perubahan tersebut terbitlah Undang-Undang Keluarga Islam di berbagai negeri, yaitu :

²⁰⁶ Sisters in Islam, *Reform of the Islamic Family Law on Poligamy*, <http://www.sisterinislam.org.my/> akses internet tanggal 12 Februari 2020, jam 13.00 WIB dan Sister in Islam, *Reform of the Islamic Family Law and Adimistration of Justice in Syariah System*, <http://www.sisterinislam.org.my/> akses internet tanggal 12 Februari 2020, jam 13.00 WIB

²⁰⁷ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, *Mekanisme Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam di Seluruh Malaysia*, <http://www.jksnpp.gov.my/> akses internet tanggal 12 Februari 2020, jam 15.00 WIB

²⁰⁸ *Loc.Cit*

²⁰⁹ Utusan Online 17 September 2005, *PM Mahu 5 Akta Syariah Diseragam Siap Disember*, <http://www.utusan.co.my/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.00 WIB

- a. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak (Ordinan No.43 Tahun 2001)
- b. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan (Enakmen No.6 Tahun 2002)
- c. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Malaka (Enakmen No.12 Tahun 2002)
- d. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Negeri Sembian (Enakmen No.11 Tahun 2003)
- e. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (Enakmen No.2 Tahun 2003)
- f. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor (Enakmen No.17 Tahun 2003)
- g. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang (Enakmen No.3 Tahun 2004)
- h. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak (Enakmen No.6 Tahun 2004)
- i. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah (Enakmen No.8 Tahun 2004)
- j. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang (Enakmen No.3 Tahun 2005)
- k. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis (Enakment No.7 Tahun 2006)
- l. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman (Enakmen No.11 Tahun 2008)

Dari 13 (tigabelas) negara bagian Malaysia yang belum dilakukan perubahan adalah Enakmen Undang-Undang Administrasi Keluarga Islam Negeri Terengganu (Enakmen No.12 Tahun 1985).²¹⁰

²¹⁰ Informasi mengenai Akta Wilaya Persekutuan, Ordinan Negeri Serawak dan Enakmen Negeri-Negeri bagian lain mengenai hukum keluarga Islam yang termutakhir, dengan merujuk

Dalam upaya proses lanjutan penyeragaman hukum keluarga Islam di Malaysia pada tahun 2005 disusun kembali draf amandemen Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Yang menjadi percontohan dalam upaya penyelarasan ini adalah Undang-Undang Keluarga Islam Akta 303 Tahun 1985. Ketentuan-ketentuan baru tersebut kemudian disahkan dan diberlakukan di Negeri Kelantan dan Negeri Selangor. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2005 perkumpulan Menteri membuat keputusan agar disahkannya draf amandemen Undang-Undang Keluarga Islam yang kemudian disahkan pada perkumpulan kedua. Kemudian draf amandemen Undang-Undang Keluarga Islam disahkan oleh Dewan Rakyat pada tanggal 26 September 2005.²¹¹

Sisters in Islam (SIS) dan aktivis *gender* lainnya kembali mengkritisi klausul-klausul amandemen. Bahkan SIS meminta untuk diadakannya debat terbuka mengenai perumusan dan implementasinya. Mereka tergabung dalam Gabungan Komunitas Kesenjangan Gender (*Joint Action Group for Gender Equality*). Dalam memorandumnya SIS dan aktivis *gender* lainnya meminta untuk dilakukannya kajian ulang terhadap Rancangan Amandemen tahun 2005. Mereka menilai bahwa Pasal-Pasal yang terkandung didalamnya banyak mendiskriminasi terhadap kaum wanita. Contohnya seperti yang ada dalam seksyen 52 terkait *fasakh* oleh suami, seksyen 23 terkait poligami, dan seksyen 107 A terkait larangan menggunakan aset suami/isteri sendiri.²¹²

Dewan Negara telah bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Amandemen pada tanggal 22 Desember 2005. Akan tetapi pihak Kerajaan

pada Portal Resmi E-Syariah, *Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah*. <http://www2.esyariah.gov.my/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.00 WIB

²¹¹ Pembela, *Latar Belakang Kontroversi Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan 2005)*, <http://www.membelaislam.wordpress.com/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.00 WIB

²¹² Joint Action Group on Gender Equality, *To Review the Islamic Family Law Federal Territories*,), <http://www.membelaislam.wordpress.com/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

menunda pengumumannya dalam Warta (*Gazatte*). Hal ini dilakukan melihat protes keras dari aktivis gender untuk segera merevisi ulang Rancangan Amandemen tersebut karena dinilai sebagai hal yang merugikan perempuan.²¹³ Karena setelah Rancangan Amandemen ini disepakati banyak aktivis *gender* yang mendesak untuk menunda pengesahan Rancangan Amandemen tersebut.²¹⁴

Pada akhirnya Rancangan Amandemen ini ditunda untuk disahkan dan pemerintah Malaysia menunjuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) agar meninjau kembali isi dari Rancangan Amandemen tersebut.²¹⁵ Setelah membatalkan beberapa klausul Rancangan Amandemen 2005 yang dipermasalahkan aktivis *gender*, pada tahun 2006 Amandeen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan disahkan dalam Akta A1261. Akta A1261 disetujui Raja pada tanggal 11 Januari 2006 dan dipublikasikan dalam Warta pada tanggal 2 Februari 2006. Dan baru mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.

3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Malaysia

Dunia Islam saat ini terlihat perkembangan hukum keluarga Islam ke arah penentuan batas minimal usia perkawinan. Hukum positif di negara yang mengadopsi hukum Islam berperan mengatur batas minimal usia perkawinan. Sebagian negara menyamakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan sebagian lainnya membedakannya.²¹⁶

Dalam hal pembentukan hukum Islam di Malaysia, Pemerintahan Malaysia memberikan wewenang kepada setiap Negeri bagiannya. Seperti

²¹³ Utusan Online 9 Maret 2006, *Pindaan Rang Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Dibentang 13 Mae*, <http://www.utusan.co.my/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

²¹⁴ Utusan Online 15 Januari 2006, *Negeri Diminta Tangguh Undang-Undang Keluarga Islam*, <http://www.utusan.co.my/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

²¹⁵ Utusan Online 23 Desember 2005, *Undang-Undang Negara Islam Diperhalusi Semula*, <http://www.utusan.co.my/> akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

²¹⁶ Tahir Mahmood, Op.Cit., h. 269-270 Lihat juga : *Jamal J Ahmad Nasir, The Status of Wowan Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, (Leiden & Boston : Brill, 2009), h. 56-59

legislasi mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan yang pertamakali dibuat Negeri Johor.²¹⁷ Peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan ini dibuat sebagai upaya dalam mencegah eksploitasi pasangan yang masih di bawah umur dan untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan belum matangnya fisik maupun psikis pasangan yang di bawah umur. Dalam Undang-Undang Administrasi Agama Islam Tahun 1978 (Enakmen 14 Pasal 113 butir 6) menerangkan bahwa batas minimal usia perkawina bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 18 tahun. Isi dari Pasal ini kemudian diikuti oleh Wilayah Persekutuan dan Negeri-Negeri bagian lainnya.²¹⁸

Di Negeri-Negeri bagian dan Wilayah Persekutuan hingga saat ini disepakati bahwa laki-laki boleh melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia 18 tahun, dan untuk perempuan boleh melangsungkan perkawina setelah mencapai umur 16 tahun. Contohnya dalam Undang-Undang Keluarga Islam Akta 303 tahun 1984, pada seksyen 8 berbunyi :

“ Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang dari pada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.²¹⁹

²¹⁷ Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur : Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999), h. 39

²¹⁸ Noraini Mohd Hasim, *Undang-Undang Keluarga Islam : Prosedur Pendaftaran Perkawinan*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), h.3

²¹⁹ Pasal tersebut berumakan hasil amandemen (*pindaan*) Akta A 902 Tahun 1994, selain pasal (*seksyen*) dalam pasal tersebut ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal-pasal berikut :

1. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak (Ordinan No.43 Tahun 2001) seksyen 8
2. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan (Enakmen No.6 Tahun 2002) seksyen 8
3. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Malaka (Enakmen No.12 Tahun 2002) seksyen 8
4. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Negeri Sembilan (Enakmen No.11 Tahun 2003) seksyen 8
5. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (Enakmen No.2 Tahun 2003) seksyen 7
6. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor (Enakmen No.17 Tahun 2003) seksyen 8
7. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang (Enakmen No.3 Tahun 2004) seksyen 8
8. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak (Enakmen No.6 Tahun 2004) seksyen 8
9. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah (Enakmen No.8 Tahun 2004) seksyen 7
10. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang (Enakmen No.3 Tahun 2005) seksyen 8
11. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis (Enakment No.7 Tahun 2006) seksyen 8
12. Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman (Enakmen No.11 Tahun 2008) seksyen 8

Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada Article 1-nya menyebutkan: “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut”. Ketentuan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun juga diadopsi oleh hukum Malaysia pada Undang-Undang Anak 2001 (Akta 611). Dalam Undang-Undang Anak Malaysia mengartikan anak adalah : “*a person under the age of eighteen years*”. Melihat isi kandungan Undang-Undang Anak Malaysia dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia melegalkan terjadinya perkawinan usia dini terutama bagi perempuan, padahal Malaysia juga termasuk negara yang telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menyatakan pada Pasal 16 Ayat 2 bahwa perkawinan anak tidak memiliki kekuatan hukum.²²⁰

Dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sejatinya Malaysia telah melakukan upaya pembaruan hukum keluarga Islam, serta telah berupaya untuk dapat keluar dari ketentuan fikih tradisional yang ada di Malaysia. Sikap ini dapat dikatakan sebagai bentuk negosiasi fikih terhadap tuntutan instrumen internasional yaitu HAM. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah glokalisasi yaitu percampuran budaya serta integrasi antara kenyataan lokal Malaysia dengan tuntutan global. Dan dapat disimpulkan bahwa penentuan batas minimal usia perkawinan di Malaysia merupakan pembaruan hukum keluarga Islam dengan tidak meninggalkan institusionalisasinya.

Walaupun langkah penentuan batas minimal usia perkawinan di Malaysia dinilai sebagai langkah pembaruan hukum keluarga Islam, akan

13. Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu (Enakmen No.12 Tahun 1985) seksyen 7

²²⁰ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, <http://www.ohchr.org/>, akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

tetapi pada perkembangan dewasa ini dituntut kembali untuk memperbarui kembali batas minimal usia perkawinan yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Pembaruan yang dimaksud adalah dengan merujuk pada instrumen *Convention on the Rights of the Child*, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, dan HAM yang menyatakan batas maksimal usia anak yaitu di bawah usia 18 tahun.²²¹

Tuntutan untuk melakukan revisi juga dilatarbelakangi atas banyaknya perkawinan usia dini yang dilegalkan oleh Mahkamah Syariah. Melihat gentingnya persoalan ini menjadikan protes dari banyaknya kalangan terhadap dampak buruk perkawinan anak terutama perempuan dengan landasan argumen keagamaan dan kebijakan di berbagai negara muslim. Dalam salah satu poin usulannya *Sisters in Islam* menegaskan agar batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan yaitu 18 tahun.²²² Akan tetapi dengan mengacu pada doktrin fikih dan hukum tradisional Pemerintah Malaysia menolak usulan tersebut.²²³

C. Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

1. Potret Negara Brunei Darussalam

Kata Brunei merupakan serapan dari bahasa sansekerta yaitu “*Varuna*” yang dalam bahasa sansekerta berarti nama seorang dewa laut. Kata *varuna* diambil dari kata “*varunadwipa*” yang memiliki arti pulau dewa laut. Kemudian kata itu berubah menjadi Waruna atau Baruna pada pengejaan lokal, sehingga dari kata Baruna menjadi Brunei, dan dalam pelafalan orang portugis berubah menjadi Borneo yang berarti pulau Kalimantan.²²⁴ Penamaan itu terjadi karena letak Negara Brunei yang berada dalam kesatuan pulau Kalimantan.

²²¹ Ahmad Rofii, Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia, dalam *Al-Manajih*, Vol. IX, No.2, 2 Desember 2015

²²² Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, *Op.Cit.*, h.1548

²²³ Zainah Anwar, Nothing Divine in Child Marriage, <http://www.thestar.com.my/>, akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 11.30 WIB

²²⁴ Muhammad Syamsu AS., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta: Lontara, 1999), h. 126.

Pemerintahan negara Brunei Darussalam memiliki corak pemerintahan monarki absolut yang berdasarkan hukum Islam. Sultan berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Tidak hanya sebatas itu, sultan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri bertindak juga sebagai Perdana Menteri dan sebagai Menteri Pertahanan. Sejak abad ke-15 M Kesultanan Brunei telah berdiri, dengan sistem penurunan kekuasaan dari sultan ke sultan lainnya sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara.

Letak geografis negara Brunei Darussalam berada di arah barat daya Sabah. Ibu kota Brunei Darussalam ialah Bandar Sri Begawan dengan luas negara $\pm 5.765 \text{ km}^2$. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei Darussalam merdeka dari Inggris dengan status sebagai bagian dari negara persemakmuran Inggris. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas adalah etnik Melayu sebanyak $\frac{2}{3}$ dari total penduduk secara keseluruhan dan 90% beragama Islam, juga terdapat etnik Cina sebanyak $\frac{1}{5}$ dari total penduduk secara keseluruha, dan sisanya etnik India.

Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam unggulan yaitu minyak bumi dan gas alam. Dengan melimpahnya sumber daya Brunei Darussalam memberi dampak positif berupa surplus devisa negara yang sangat besar. Dengan keadaan ekonomi yang sangat baik, pemerintah menanggung semua fasilitas umum seperti listrik, angkutan umum, telpon, air, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Bahkan kewajiban pajak hanya kepada perusahaan minyak dan tidak ada pajak bagi perorangan.

Brunei Darussalam memiliki filosofi politik adalah yang begitu ketat akan Melayu Islam Beraja (MIB). Terdapat 2 filosofi dasar : *pertama*, Islam sebagai prinsip yang membimbing (*Guiding Principle*), dan kedua Islam sebagai benteng (*Form of Fortification*). Dari dua konsep fundamental ini kemudian muncullah nilai-nilai ke-Islam-an kenegaraan yang terdiri dari tiga konsep. *Pertama*, memelihara Negara Melayu. *Kedua*, memelihara

Negara Islam dengan paham agama mazhab Syafi'i dalam sisi fiqhnya dan mazhab Ahl Sunnah wa al-Jamaah pada paham akidahnya. *Ketiga*, memelihara negara kerajaan. Dalam upaya merealisasikannya, pemerintah membentuk tim untuk menyusun materi yang kemudian dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi.²²⁵

Kesultanan Brunei Darussalam mulai berdiri pada tahun 1402 M dengan sultan sebagai pemimpin dan terus berlanjut hingga saat ini. Sultan-sultan brunei dari masa ke masa yang tercatat dalam sejarah yaitu²²⁶ :

- a. Sultan Muhammad Syah (Awang Alak Betatar, 1402-1408 M),
- b. Sultan Ahmad (1408-1425 M),
- c. Sultan Syarif Ali (1426-1432 M),
- d. Sultan Sulaiman (1432-1485 M),
- e. Sultan Bulkiyah (1485-1524),
- f. Sultan Abd. Kahar (1524-1530 M),
- g. Sultan Syaiful (1533-1581 M),
- h. Sultan Syah Brunei (1581- 1582 M),
- i. Sultan Muhammad Hasan (1582-1597 M),
- j. Sultan Abd.Jalil Akbar (1597-1654 M),
- k. Sultan Raja Tengah (1630-1668 M),
- l. Sultan Abd. Mubin (1668-1873 M),
- m. Sultan Nasruddin (1690-1710 M),
- n. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852 M),
- o. Sultan Hasyim Jalilul Alam (1885-1906 M),
- p. Sultan Muhammad Jamalul Alam (1906-1924 M),
- q. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950 M),
- r. Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967 M),
- s. Sultan Hassanal Bolkiyah (1967- sekarang).

²²⁵ Mahmud Saedon Awang Othman, *Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-undang Islam di Negara Brunei Darussalam*, (Bandar Sri Begawan : Satu Tinjauan , t.th) h.21

²²⁶ Atho' Mudzhar dan Khaeruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 176. Lihat pula Muhammad Syamsu AS., op.cit., h. 128.

2. Kodifikasi Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

Sebelum masuknya Inggris ke Brunei Darussalam orang Islam menggunakan Hukum Kanun Brunei sebagai pedoman hukum. Pada dasarnya Hukum Kanun Brunei adalah Hukum Kanun Melaka yang disalin menjadi sebuah teks undang-undang. Sebab Kesultanan Melaka merupakan kerajaan Islam yang berkembang pada saat itu bahkan pengaruh Islam yang datang ke Brunei Darussalam berasal dari Kesultanan Melaka.²²⁷ Dalam sejarah, Brunei Darussalam bukanlah sebuah negara bekas jajahan, melainkan negara yang berada di bawah naungan Inggris. Namun demikian, Britishisasi dalam sistem pemerintahan dan perundang-undangan tetap terjadi di Brunei Darussalam sama seperti negara jajahan Inggris pada umumnya.²²⁸ Walaupun demikian Inggris tetap memperhatikan hukum Islam dengan melahirkan Undang-Undang Islam, contohnya *Muhammadan's Law* pada tahun 1911 sebagai Enakmen Undang-Undang Uagama Islam. *Muhammadan's Law* berisi hukum tentang permasalahan ibadat dan hukum keluarga, terutama mengenai perkara nikah dan cerai bagi yang beragama Islam. Kemudian pada tahun 1913 disetujuinya *Muhamadan's Marriage and Divorce Enactment* (laws of Brunei 1906-1930, Enakmen No. 2 of 1913) yang merupakan penyempurnaan atas *Muhammadan's Law* 1911.²²⁹

²²⁷ M.B Hooker, *Islamic Law in South- East Asia*, Terj. Rohani Abd. Rohim, dkk. (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1991), h. 173. Undang-undang Adat Brunei Darussalam lama yang dikenal dengan nama "Naskah Lawas", dalam sejarah Lawas merupakan wilayah bagian Brunei Darussalam yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Sarawak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah perkawinan dalam Hukum Kanun Brunei adalah pasal 18 tentang hukuman yang meminang pinangan orang lain, pasal 20 tentang syarat-syarat perkawinan dan lafaz dalam akad perkawinan, pasal 28 tentang khiyar dan fasakh, dan pasal 29 tentang perceraian. Lihat : Mahmud Saedon Awang Othman, *Op.Cit.*, h. 80.

²²⁸ Dato Seri Setia Awang Salim Haji Besar, *Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Negeri Brunei*, (Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1998), h. 4-5. Lihat juga : Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 90.

²²⁹ Isi dari peraturan ini hanya berupa penyempurnaan aturan dalam Muhammadan Law. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Op.Cit.* h. 180. Lihat juga : Dato Seri Setia Haji Awang Salim Haji Besar, *Op.Cit.*, h. 5-6.

Pada tahun 1888 barulah Brunei Darussalam memiliki kekuasaan di bidang hukum secara penuh, dengan perjanjian pada 1888 dalam Artikel VII tertera aturan:

- a. Bidang kekuasaan sipil dan jinayah untuk posisi kekuasaan Inggris dalam mengendalikan rakyat, negara rakyat dan negara jajahan Inggris dan rakyat negara lain dengan hendaknya mendapat persetujuan dari negara mereka.²³⁰
- b. Bidang yang diperintah untuk dihakimkan oleh rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam bidang tersebut merupakan penuntut atau pendakwa. Namun jika di yang terjadi adalah rakyat Brunei dituntut atau didakwa maka kausu itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.²³¹

Hukum Kanun Brunei, undang-undang dan adat Melayu lama merupakan hukum perkawinan tertulis pertama yang digunakan negara Brunei Darussalam.²³² Hukum Kanun Brunei terdiri dari 96 Pasal, sedangkan Undang-Undang dan Adat Brunei Lama terdapat 68 Pasal.²³³ Isi dari Hukum Kanun Brunei masih bercampur dengan adat Melayu. ditulis pada masa kepemimpinan Sultan Hassan yaitu tahun 1605-1619 M, dan baru berlakukan secara sempurna pada masa kepemimpinan Sultan Jalilul Akbar pada tahun 1619-1649. Bahkan tuntutan untuk melaksanakan hukum tersebut tertera dalam wasiat Sultan Jalilul Akbar kepada putranya yang bernama Sultan Abdul Jalilul Jabbar yang memimpin kerajaan pada tahun 1649-1652 M. Ditulis dalam wasiat tersebut bahwa segala hal yang berhubungan dengan negeri hendaknya ada kesepakatan dikalangan Perdana

²³⁰ Tahir Mahmood, *Op.Cit*, h.198.

²³¹ *Ibid.*, h. 198.

²³² Sebelumnya negara Brunei Darussalam adalah bagian dari Borneo (Kalimantan) Utara, sama seperti negeri Serawak dan Sabah. Dengan alasan adanya kekerasan dalam pemungutan pajak negeri Serawak keluar dari wilayah Brunei Darussalam. Dan pada akhirnya negeri Serawak berpisah dari Brunei dan sempat dijajah oleh Inggris.

²³³ Haji Mahmoed Saedon bin Awang Othman, *Op.Cit.*, h. 22. Lihat juga : Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 89.

Menteri, anak-anak raja, semua menteri dan semua sanak saudara, dan tentang hukum negeri hendaknya ada kesepakatan di kalangan keempat unsur tersebut, berdasarkan hukum adat, Undang-undang Kanun, dan Hukum Islam.²³⁴

Undang-undang Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan adanya Perjanjian Perdagangan dan Persahabatan setelah disepakatinya hubungan resmi kerajaan Inggris dengan Brunei Darussalam pada tahun 1847. Kemudian pada tahun 1888 Brunei Darussalam disahkan sebagai negara naungan Inggris. Setelah disahkan sebagai negara naungan Inggris terdapat sejumlah perjanjian tambahan yang disepakati pada tahun 1905 dan 1906 beberapa perjanjian lagi ditandatangani yang dinamakan Perjanjian Protektorat dan sepakat atas sistem residen yang diberlakukan. Dengan akibat hukum penduduk dalam semua hal kecuali yang berkaitan dengan agama Islam.²³⁵

Negeri-negeri Melayu yang berada di bawah naungan Inggris juga menerapkan sistem hukum yang sama. Semua undang-undang disesuaikan dengan sistem perundang-undangan Inggris yang mengakibatkan minimnya penerapan perundangan Islam dan menyebabkan bentuk administrasi undang-undang Islam terlihat derivatif.²³⁶

Pada tahun 1924 *The Muhammadan Laws Enactment No. 1 of 1912* Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Tajuddin disahkan sebagai undang-undang tambahan atas *The Muhammadan Laws Enactment No. 1 of 1912* dengan sebutan lain *Brunei Order in Council 1924 No. 1 of 1924*. Walaupun demikian undang-undang ini tidak terlepas dari *Muhammadan Marriages and Divorce Enactment No. 3 of 1913*, karena jika dilihat isinya secara

²³⁴ Manuskrip asli ada dalam simpanan Arsip Meseum Sarawak (simpanan Arkib Muzium Sarawak), dikutip dari Haji Mahmoed Saedon bin Awang Othman, *Op.Cit.*, h.. 27. Lihat juga : Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*,h. 89.

²³⁵ Hajah Sa'adiyah binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, Suara Wanita Brunei. (Bandar Seri Begawan: Pusat Da'wah Islamiah, 2012), h. 161.

²³⁶ M. B. Hooker, *Op.Cit.*, h. 201.

keseluruhan sangat berkaitan dengan Peraturan Nikah dan Cerai dalam agama Islam.²³⁷

Pada tahun 1941 Kadi Besar Brunei Darussalam memberi saran agar dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Keluarga Islam. Usulan amandemen tersebut dilatarbelakangi akan minimnya materi Undang-Undang Perkawinan Islam yang hanya meliputi peraturan mengenai nikah dan cerai saja. Amandemen tersebut berisi saran untuk melengkapi aturan yang dapat mencakup seluruh bidang yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Brunei Darussalam. Dalam rangka merealisasikan maksud amandemen Duli Yang Maha Mulia melantik Penasihat Jama'ah Syariah atau dengan sebutan *Muhammadan Religious Advisers* untuk merumuskan isi dari amandemen Undang-Undang Keluarga Islam.²³⁸

Pada tahun 1955 sebelum Brunei Darussalam merdeka sempat disahkannya draft administrasi mengenai Undang-Undang Keluarga Islam dengan nama Undang-Undang Majlis Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1955. Undang-Undang Keluarga Islam tersebut kemudian diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1956.²³⁹

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya memang dalam Undang-Undang Majlis Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1955 cakupan yurisdiksinya lebih banyak. Akan tetapi undang-

²³⁷ Hajah Sa'adiyah binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, *Op.Cit.*, h. 162.

²³⁸ Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei, 1954-1979 (Brunei: Pusat Dakwah Islamiah, 1981), h. 1

²³⁹ Pada tanggal 29 September 1959 Perlembagaan Bertulis Brunei menetapkan perjanjian yang telah disepakati kerajaan Brunei dengan Inggris. Perjanjian itu berisi tentang pembatalan campur tangan Inggris dalam urusan domestik Brunei Darussalam, juga menghapuskan jawatan Residen yang diganti dengan jawatan Pesuruhjaya Tinggi yang cakupan tugasnya hanya mengurus urusan administrasi luar negeri dan pertahanan Brunei Darussalam. Peristiwa ini terjadi pada zaman pemerintah Sultan Omar Ali Saifuddien III, yaitu Sultan Brunei yang ke-28. Lihat Zainab Binti Awang Haji Tuah, *Perkembangan Pentadbiran Mahkamah Syariah di Brunei Darussalam*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam, 2009), h. 39. Perancangan undang-undang ini mengadopsi Undang-undang Negeri Kelantan, yang telah diubah dengan menyesuaikan sosio-kultural adat negara Brunei pada saat itu.

undang tersebut masih seputar perkara-perkara perdata ditambah dengan perkara pidana dalam kasus *khalwat*, perzinaan, dan minuman keras.

Pasca kemerdekaan Brunei Darussalam, undang-undang Islam berkembang semakin pesat. Pada priode ini dirumuskannya Perintah Darurat 1998 yang notabenenya mengangkat kedudukan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Brunei Darusslam serta memperluas kewenangan dalam bidangnya dan mensejajarkannya dengan kedudukan Mahkamah Sivil. Perkembangan ini tidak terlepas dari permintaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah yang disampaikan pada Hari Keputeraan-nya 15 Juli 1996 (ulang tahun) yang ke-50 tahun yang bertempat di Istana Nurul Iman.²⁴⁰

Pada tahun 1984 terjadi revisi Undang-Undang Negara Brunei Darusslam (*Revision Laws of Brunei*). Revisi juga dilakukan pada Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1956 dengan merubah namanya menjadi Akta Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77 dan merubah sebagian kecil dari isinya.²⁴¹ Akan tetapi Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa Akta Penggal 77 memiliki berbagai kelemahan, diantaranya:

- a. Terdapat beberapa ketentuan yang tidak jelas;
- b. Kententuan yang bersifat multitafsir;
- c. terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat; dan
- d. adanya konflik administrasi antara dua sistem peradilan.

Sebagai upaya meminmalisir adanya kekurangan ini, untuk itu dilakukan:

²⁴⁰ Hajah Saadiah binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, *Op.Cit.*, h. 3.

²⁴¹ Sejatinya isi dari Akte Penggal sama dengan Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 yang terbit tahun 1955, di mana Undang-Undang Keluarga Islam yang terdapat di dalamnya 29 bab, dengan judul *Marriage and Divorce* di bagian ke-VI, yaitu pasal 134-156. Dan judul *Maintenance of Dependants* di bagian ke-VII, dimulai dari pasal 157-163. Susunan Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 secara substansial sama dengan Undang-Undang Keluarga Islam yang ada di Negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Lihat : Dato Seri Setia Haji Awang Salim Haji Besar, *Op.Cit.*, h. 7.

- a. membuat peraturan mengenai urusan pejabat kadi yang tidak ada di undang-undang
- b. adanya fatwa dari mufti-mufti kerajaan, dan
- c. Mahkamah Sivil diminta agar dapat melaksanakan kebijakan untuk dapat menetapkan dan melaksanakan perintah dari Mahkamah Kadi.²⁴²

Dalam penelitian Hooker ia mengatakan bahwa Undang-Undang Keluarga Islam yang digunakan Brunei Darussalam merupakan hasil adopsi dari Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan akan tetapi terdapat beberapa penyesuaian terhadap konteks negara Brunei Darussalam. Isi dari undang-undang ini adalah:

- a. Bagian I Pasal 1-4 tentang Pendahuluan;
- b. Bagian II Pasal 5-44 tentang Majlis Ugama Islam;
- c. Bagian III Pasal 45-96 tentang Mahkamah Syariah;
- d. Bagian IV Pasal 97-122 tentang Masalah Keuangan;
- e. Bagian V Pasal 123-133 tentang ;
- f. Bagian VI Pasal 134-156 tentang Perkawinan dan Perceraian;
- g. Bagian VII Pasal 157-163 tentang Nafkah Tanggungan;
- h. Bagian VIII Pasal 164-168 tentang Mualaf;
- i. Bagian IX Pasal 169-195 tentang Kesalahan; dan
- j. Bagian X Pasal 196-204 tentang Perkara Umum.²⁴³

Pada masa yang sama dalam rangka membentuk pedoman Undang-Undang Keluarga Islam, Menteri-Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur Malaysia. Adapun hasil dari pertemuan ini Majlis Ugama

²⁴² Adanya ketidakjelasan dalam Undang-Undang Keluarga Islam ini contohnya pada pasal 134 tentang Penggunaan Undang-Undang, yang menyatakan bagi setiap yang warga negara yang beragama Islam diperbolehkan menjalankan pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang asalkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Aturan ini bersifat terlalu umum dengan tidak membedakan antara warga negara Brunei dan warga negara bukan Brunei. Lihat Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 91.

²⁴³ M.B. Hooker, *Op.Cit.*, h. 203. Lihat juga : Tahir Mahmood, *Op.Cit.*, h. 198.

Islam membuat draf cadangan Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam dalam menggantikan Akta Penggal 77.²⁴⁴

Diantara Undang-undang Keluarga Islam dalam perintah darurat dan juga tambahan perintah perlindungan keluarga adalah:

a. Perintah Darurat Undang-undang Keluarga Islam Tahun 1999

Tepatnya tahun 1999, disahkannya Perintah Darurat Undang-undang Keluarga Islam Tahun 1999. Perintah Darurat ini berfungsi sebagai pedoman perkara hukum keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Amanat pembuatan Perintah Darurat ini terdapat dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam pada bagian (3) bab 83 dari. Perintah Darurat ini dinamakan “Suatu Perintah bagi draft peruntukkan-peruntukan tertentu mengenai Undang-undang Keluarga Islam berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berhubungan dengan kehidupan keluarga”.²⁴⁵

Dalam Perintah Darurat Undang-undang Keluarga Islam Tahun 1999 ini terdapat 10 (sepuluh) bagian, yaitu:

- 1) Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari Pasal 1-7.
- 2) Bab II tentang Perkawinan yang terdiri dari Pasal 8-23.
- 3) Bab III tentang Pendaftaran Perkawinan yang terdiri dari Pasal 24-32.

²⁴⁴ MABIMS merupakan hasil wujud suatu kesepakatan antar negara atas dasar keagamaan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat Islam tanpa adanya hal-hal yang bersifat politik walaupun memiliki undang-undang keagamaan masing-masing tiap negara. MABIMS berdiri pada tanggal 5 Muharram 1410 H / 7 Agustus 1989 yang terdiri dari 4 negara anggota yaitu: (1) Brunei Darussalam, (2) Indonesia, (3) Malaysia, dan (4) Singapura. MABIMS mengadakan konferensi pertamakalinya di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada saat pertemuan pertama hanya dihadiri oleh 3 negara yaitu Menteri Brunei Darussalam diwakilkan oleh Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Setia Ustaz Awang Haji Mohd Zain bin Haji Serudin, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Agama Kiayi Haji Munawir Sjadzali, dan Malaysia diwakilkan oleh Dr. Mohd. Yusof Noor, <http://emabims.org/>, pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 16.23 WIB.

²⁴⁵ Hajah Saadiah binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, *Op.Cit.*, h. 4.

- 4) Bab IV tentang Hukuman dan Ketentuan Penyitaan Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan yang terdiri dari Pasal 33-39.
- 5) Bab V tentang Pembubaran Perkawinan yang terdiri dari Pasal 40-60.
- 6) Bab VI tentang Nafkah Istri, Anak dan Lain-lain yang terdiri dari Pasal 61-87.
- 7) Bab VII tentang Pengasuhan Anak yang terdiri dari Pasal 88-94.
- 8) Bab VIII tentang Rampaian yang terdiri dari Pasal 113-122.
- 9) Bab IX tentang Hukuman yang terdiri dari Pasal 123-139.
- 10) Bab X tentang Perkara-Perkara Umum yang terdiri dari Pasal 140-147.²⁴⁶

Pada umumnya secara keseluruhan nilai-nilai kesetaraan *gender* telah tertuang dalam Perintah Darurat Undang-undang Keluarga Islam Tahun 1999. Sebagai contoh dalam melaksanakan proses permohonan untuk menikah, proses pertunangan, , pendaftaran perkawinan dan prosedur dalam akad nikah, memiliki akta nikah, dan akta talak. Perintah Darurat ini juga menjamin dan memberi perlindungan segi finansial (nafkah) kepada isteri dengan mewajibkan pemberian mas kawin kepada istri dan kewajiban nafkah. Begitu juga jaminan ekonomi apabila terjadi perceraian dengan biaya *mutah*, nafkah *'iddah*, harta bersama, dan nafkah anak pasca perceraian yang berada dalam hak asuh istri.⁸³

b. Amandemen Perintah Perlindungan Keluarga Tahun 2010

Pada bulan Juni 2010 Amandemen Perintah Perlindungan Keluarga ini disetujui. Amandemen ini dibuat dalam upaya perlindungan atas wanita yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disebutkan dalam Amandemen Perintah Perlindungan Keluarga bahwa diantara bentuk pelanggaran yang berhak dilaporkan adalah:

²⁴⁶ *Ibid.*, h.5

- a. Kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam bentuk fisik atau mental, khususnya yang berkaidan dengan *maqashid syariah* yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan akal, dan perlindungan harta.
- b. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan keluarga, perlindungan. Juga hak perampasan dan hak mendapatkan perintah tambahan.
- c. Peran perlindungan mencakup kewajiban penegakan hukum, peran dan tanggung jawab Kementerian Kebajikan Pemuda dan Olahraga, serta Perintah penangkapan dan proses pendakwaan.²⁴⁷

Setelah melihat sejarah kodifikasi hukum keluarga Brunei Darussalam dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum keluarga di Brunei Darussalam dimulai dari adanya hubungan antara Brunei Darussalam dengan Inggris. Sejak datangnya Inggris, Hukum Keluarga Islam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah Brunei Darussalam. Pembaharuan demi pembaharuan terus terjadi dari sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan tahun 1984.²⁴⁸

3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Brunei Darussalam

Dalam hal pembentukan hukum keluarga di negara Brunei Darussalam, Pemerintahan Brunei Darussalam membedakan pemberlakuan hukum keluarga berdasarkan ras dan agama masing-masing penduduk. Penggolongan ini terdiri dari beberapa ras dan agama diantaranya Islam, Cina dan Kristen. Penegasan ini terlihat dalam Undang-Undang Brunei Bab 47 tentang Perkawinan (Kristen) Bagian 1 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi :

“Undang-undang ini tidak berlaku untuk pernikahan yang dikontrak sesuai dengan yang digunakan Muslim, Hindu, Budha, Dayak dan orang lain yang diperintah oleh hukum atau kebiasaan pernikahan mereka sendiri yang diakui oleh Hukum Brunei Darussalam. Menjadi sah dan efektif jika

²⁴⁷ Tambahan Perintah Perlindungan Keluarga 2010, Pasal 60K, Pasal 60(1), dan pasal 60(b).

²⁴⁸ M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 196.

salah satu pihak yang melakukan perkawinan tersebut adalah anggota ras atau agama menurut siapa yang menggunakan kontrak pernikahan tersebut.”

Diantara undang undang perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam ialah :

- 1) Undang-Undang Brunei Bab 17 tentang Hukum Keluarga Islam Seri 12 Tahun 2000 yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada Seri17 Tahun 2005, Seri 42. Tahun 2004, Seri 62 Tahun 2010 dan Seri6 Tahun 2012.²⁴⁹
- 2) Undang-Undang Brunei Bab 47 tentang Perkawinan (Kristen) No.8 Tahun 1948 yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu No. 6 Tahun 1951, No. 42 Tahun 2005, dan No.4 Tahun 2013.²⁵⁰
- 3) Undang-Undang Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Orang Cina No.6 Tahun 1995 yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu Seri 6 99/59 dan Seri 44/84.²⁵¹

Dalam hal batasan minimal usia perkawinan setiap undang-undang menerapkan batasan minimal usia perkawinan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Brunei Bab 47 tentang Perkawinan (Kristen) Bagian I Pasal 3 Ayat 1 (a) dalam *Capacity to marry* dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dua orang yang dapat melakukan pernikahan yang sah kecuali kedua belah pihak dalam pernikahan yang dimaksudkan telah mencapai usia 14 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Orang Cina menegaskan perkawinan orang Cina tidak boleh didaftarkan, juga tidak berlaku, sampai perempuan berusia 15 tahun oleh menurut perhitungan Inggris.

Undang-Undang Brunei Bab 17 tentang Hukum Keluarga Islam tidak tegas menentukan batasan minimal usia perkawinan. Undang-Undang Brunei Bab 17 tentang Hukum Keluarga Islam hanya saja pada Bagian IV Pasal 35 huruf (b) dalam *Interference with marriage* termaktub “dalam usaha mencegah seorang pria yang telah mencapai usia 18 tahun atau wanita yang telah mencapai usia 16 tahun dari memasuki pernikahan yang sah dapat dinyatakan bersalah karena pelanggaran dan bertanggung jawab atas

²⁴⁹ LAWS OF BRUNEI CHAPTER 217 ISLAMIC FAMILY LAW

²⁵⁰ LAWS OF BRUNEI CHAPTER 76 MARRIAGE

²⁵¹ LAWS OF BRUNEI CHAPTER 126 CHINESE MARRIAGE ACT